



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Muhammad Husni Thamrin No. 11
Telp. dan Fax. (0536) 3224547
Palangka Raya 73112
2019

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis.....	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Kondisi Kepegawaian	8
F. Isu – isu Strategis.....	10
G. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RPJMD Tahun 2016 – 2021	13
B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021	15
C. Penetapan Kinerja Tahun 2018.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018	21
B. Analisis Capaian Kinerja	37
C. Akuntabilitas Keuangan	98
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
LAMPIRAN	
A. Perjanjian kinerja tahun 2018.....	114
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018.....	117
C. Rencana Kinerja Tahunan 2018	120
D. Rencana Kinerja Tahunan 2019	122
E. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018	124
F. Sertifikat ISO 9001:2015.....	133

G. *Anugerah Parahita Eka Praya (APE) 2018*..... 134

H. *Interface Website DP3APPKB*..... 135

I. *Interface SIGA Kalteng* 136

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB I	
1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian.....	8
1.2 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan	8
1.3 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan	8
1.4 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	9
1.5 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan	9
1.6 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia.....	10
BAB II	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	16
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	19
2.3 Penetapan Kinerja	22
BAB III	
3.1 Realisasi Sasaran.....	26
3.2 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran	27
3.3 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 1-2.....	31
3.4 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 3	32
3.5 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 4	33
3.6 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 5	34
3.7 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 6	34
3.8 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 7- 8.....	36
3.9 Dimensi Pengukuran IPG.....	37
3.10 Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru	37
3.11 Dimensi Pengukuran IDG	38
3.12 Capaian IDG dan IPG 2014 – 2017	38
3.13 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 9	39
3.14 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 10 -11.....	39
3.15 Data PUS dan Peserta KB Aktif 2016 – 2018.....	40
3.16 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 12.....	40
3.17 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.....	43
3.18 Indikator Kinerja Sasaran 1.....	44
3.19 Program Kegiatan ARG Tahun 2018.....	45
3.20 Program Kegiatan ARG Tahun 2017	45

3.21	Indikator Kinerja Sasaran 2.....	55
3.22	Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan partai dan Jenis Kelamin..	55
3.23	Sumbangan Pendapatan Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah 2014 - 2018.....	55
3.24	Indikator Kinerja Sasaran 3.....	61
3.25	Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2016 – 2018.....	61
3.26	Indikator Kinerja Sasaran 4.....	61
3.27	Indikator Kinerja Sasaran 5.....	69
3.28	KLA berdasarkan penilaian mandiri 2018	69
3.29	Capaian Kabupaten Katingan dan Lamandau	69
3.30	Data Kekerasan Terhadap Anak 2016- 2018 pada P2TP2A	65
3.31	Indikator Kinerja Sasaran 6.....	70
3.32	Indikator Kinerja Sasaran 7	76
3.33	Indikator Kinerja Sasaran 8.....	76
3.34	Indikator Kinerja Sasaran 9.....	80
3.35	Indikator Kinerja Sasaran 10	80
3.36	Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018	78
3.37	Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2017	78
3.38	Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2016	78
3.39	Indikator Kinerja Sasaran 11	80
3.40	Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2018	80
3.41	Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2017	80
3.42	Kondisi BTL dan BL 2017 – 2018.....	83
3.43	Realisasi Belanja Langsung 2017 – 2018.....	84
3.44	BTL 2014 – 2018.....	90
3.45	BL 2014 – 2018.....	90
3.46	Relisasi Kegiatan dibawah 80%.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
BAB I	
1.1 Struktur Organisasi	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.....	7
3.25 Tingkatan KLA.....	68

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu tahun 2018. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi No. 53 Tahun 2014 bahwa nomenklatur LKIP mengalami perubahan menjadi LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Pada LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2018 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2018 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2019.

Dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini disajikan :

1. Dokumen Penetapan Kinerja, yaitu merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan sebagai alat untuk :

- Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKIP;
- Menilai keberhasilan organisasi.

2. Pengukuran kinerja, setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja

Hasil pengukuran kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

3. Laporan Akuntabilitas kinerja, yaitu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang :

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahun yang direncanakan (RPJMD)

Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Semoga penyajian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palangka Raya, 28 Februari 2019

KEPALA DINAS,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dan rencana kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2018. Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, yaitu Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah. Untuk itu seluruh program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada tujuan sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RENSTRA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan tahun 2016-2021 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam rancangan awal Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tahun 2016-2021. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan adalah “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan adalah (1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan, (2) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak, (3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta (4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana.

Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 6 (Enam) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran strategis, Kesebelas sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah realisasinya pada tahun 2018 mencapai **137,60 Persen** dengan pengukuran pada masing-masing **tujuan strategis** sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persen	2,14	2,26	105,61
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	28,89	28,89	100
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Persen	33,31	33,39	100,24
Rata - rata capaian Tujuan					101.95%

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,0244	0,0105	233,41
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	Persen	100	100	100
Rata - rata capaian Tujuan					166,70%

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	Persen	28,57	14,29	50
	Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0244	0,0422	57,86
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	100	100	100
Rata - rata capaian Tujuan					69,29%

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas data gender dan anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Persen	8,89	27,91	313,91%
Rata - rata capaian Tujuan					313,91%

Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	B	B	100%
Rata - rata capaian Tujuan					100%

Tujuan 6 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,31	2,50	92,40%
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Anak	1,2	0,66	182,37
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	0,806	0,787	97,64
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	19,4	11,31	171,56
Rata - rata capaian Tujuan					135,99%

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	105,61%
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	100,12%
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	233,41%
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100%
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	53,93%
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	100%
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	313,91%
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100%
9.	Menurunnya angka kelahiran	137,88
10.	Meningkatnya akseptor KB	97,64%
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	171,56%
Rata-rata persentase Capaian Sasaran		137,60%

Dalam hal anggaran, dukungan APBD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 sebesar Rp. 11.990.711.216,- dengan alokasi sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK(%)
1.	Belanja Tidak Langsung	7.313.078.668	6.458.149.599	88,31	100
2.	Belanja Langsung	7.828.755.992	4.927.634.188	89,37	100
Jumlah		15.141.834.660	13.454.445.455	88,86	100

Pencapaian kinerja input pada masing-masing Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		
			Keuangan	%	Fisik
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.480.155.192	1.443.489.934	97,52	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000	7.500.000	100,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.396.192	25.398.925	71,76	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	68.000.000	62.597.679	92,06	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	643.325.000	636.500.000	98,94	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	150.000.000	137.492.000	91,66	100
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000	19.950.000	99,75	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	49.999.600	100,00	100
8	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	39.830.000	99,57	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	100
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	46.000.000	45.721.000	99,39	100
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.320.000	13.320.000	100,00	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	29.975.000	99,92	100
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	196.000.000	195.063.495	99,52	100
14	Rapat-rapat koordinasi	170.614.000	170.142.235	99,72	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		
			Keuangan	%	Fisik
1	2	3	4	5	6
	dan konsultasi ke dalam daerah				
II	Program peningkatan S arana dan Prasarana Aparatur	35.000.000	35.000.000	100,00	100
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dan tempat parkir	25.000.000	25.000.000	100,00	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.000.000	47.892.000	99,78	100
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	48.000.000	47.892.000	99,78	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas S umber Daya Aparatur	15.000.000	12.825.000	85,50	100
1	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000	12.825.000	85,50	100
V	Program Peningkatan Pengembangan S istem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54.413.000	53.875.000	99,01	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja S KPD	11.302.000	11.149.600	98,65	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.111.000	12.847.200	97,99	100
3	Penyusunan RKA-S KPD	15.000.000	14.878.200	99,19	100
4	Penyusunan renja S KPD	15.000.000	15.000.000	100,00	100
VI	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	22.650.000	22.097.000	97,56	100
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	22.650.000	22.097.000	97,56	100
VII	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	1.920.188.800	1.882.646.647	98,04	100
1	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	200.000.000	197.904.579	98,95	100
2	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota	65.000.000	63.175.000	97,19	100
3	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	593.788.800	570.820.400	96,13	100
4	Rapat Koordinasi Gugus	75.000.000	74.398.600	99,20	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		
			Keuangan	%	Fisik
1	2	3	4	5	6
	Tugas PHA Tingkat Provinsi				
5	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	200.000.000	197.664.050	98,83	100
6	Rakornas Forum Anak Nasional	171.000.000	168.919.607	98,78	100
7	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	66.804.000	64.996.400	97,29	100
8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	104.500.000	104.499.800	100,00	100
9	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA	271.000.000	270.913.061	99,97	100
10	Monev PUG di Daerah	91.246.000	89.333.000	97,90	100
11	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didaerah	81.850.000	80.022.150	97,77	100
VIII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	87.453.000	84.368.650	96,47	100
1	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	55.000.000	52.115.700	94,76	100
2	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	32.453.000	32.252.950	99,38	100
IX	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	746.000.000	727.171.330	97,48	100
1	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	250.000.000	246.643.839	98,66	100
2	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	288.000.000	278.300.537	96,63	100
3	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se-Kab./Kota	80.000.000	78.127.004	97,66	100
4	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)	40.000.000	40.000.000	100,00	100
5	Sosialisasi advokasi layanan P2TP2A	48.000.000	47.099.950	98,12	100
6	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	40.000.000	37.000.000	92,50	100
X	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	2.403.071.000	1.719.844.327	71,57	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		
			Keuangan	%	Fisik
1	2	3	4	5	6
1	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	100.000.000	92.615.000	92,61	100
2	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	2.220.571.000	1.546.947.527	69,66	100
3	Capacity Building Bagi Perempuan	37.500.000	36.675.000	97,80	100
4	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	45.000.000	43.606.800	96,90	100
XI	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	160.000.000	156.427.600	97,77	100
1	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	80.000.000	79.941.800	99,93	100
2	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	80.000.000	76.485.800	95,61	100
XII	Program Penyusunan Profil Lembaga	244.643.000	206.578.678	84,44	100
1	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	32.351.000	32.351.000	100,00	100
2	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	145.959.000	111.287.778	76,25	100
3	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	66.333.000	62.939.900	94,88	100
XIII	Program Keluarga Berencana	294.182.000	287.219.890	97,63	100
1	Pelayanan KIE	65.000.000	63.892.400	98,30	100
2	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	29.670.000	28.669.850	96,63	100
3	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	62.000.000	61.938.900	99,90	100
4	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	41.200.000	36.881.000	89,52	100
5	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga	50.000.000	49.934.140	99,87	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		
			Keuangan	%	Fisik
1	2	3	4	5	6
	Berencana dan Keluarga Sejahtera				
6	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	46.312.000	45.903.600	99,12	100
XIV	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	268.000.000	267.859.850	99,95	100
1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	268.000.000	267.859.850	99,95	100
XV	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	50.000.000	48.999.950	98,00	100
1	Peningkatan Kualitas SDM	50.000.000	48.999.950	98,00	100

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran harus lebih cermat agar tidak menghambat pencapaian kinerja *output* dan *outcome* dengan mempertimbangkan Program/Kegiatan prioritas.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif guna mendukung proses pelaksanaan pencapaian kinerja di bidang layanan masing-masing.
3. Mengingat masih kurangnya data sektoral terkait capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berupa data primer maupun data sekunder Perlu dilakukan inventarisasi dan survey data untuk mempermudah pengukuran kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya.
4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Melalui LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kiman Tengah Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKIP).

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai *feedback* yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. peformulaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.

5. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan

kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;

7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelemagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan kependudukan.

C. Aspek Strategis

Berdasarkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, serta keselarasan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan visi *“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri Dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religious, Kuat Amanah Dan Harmonis)”*. Dengan visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan tata ruang wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai

4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan hidup dan Sumber daya alam
8. Pengelolaan Pendapatan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam “Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata” dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

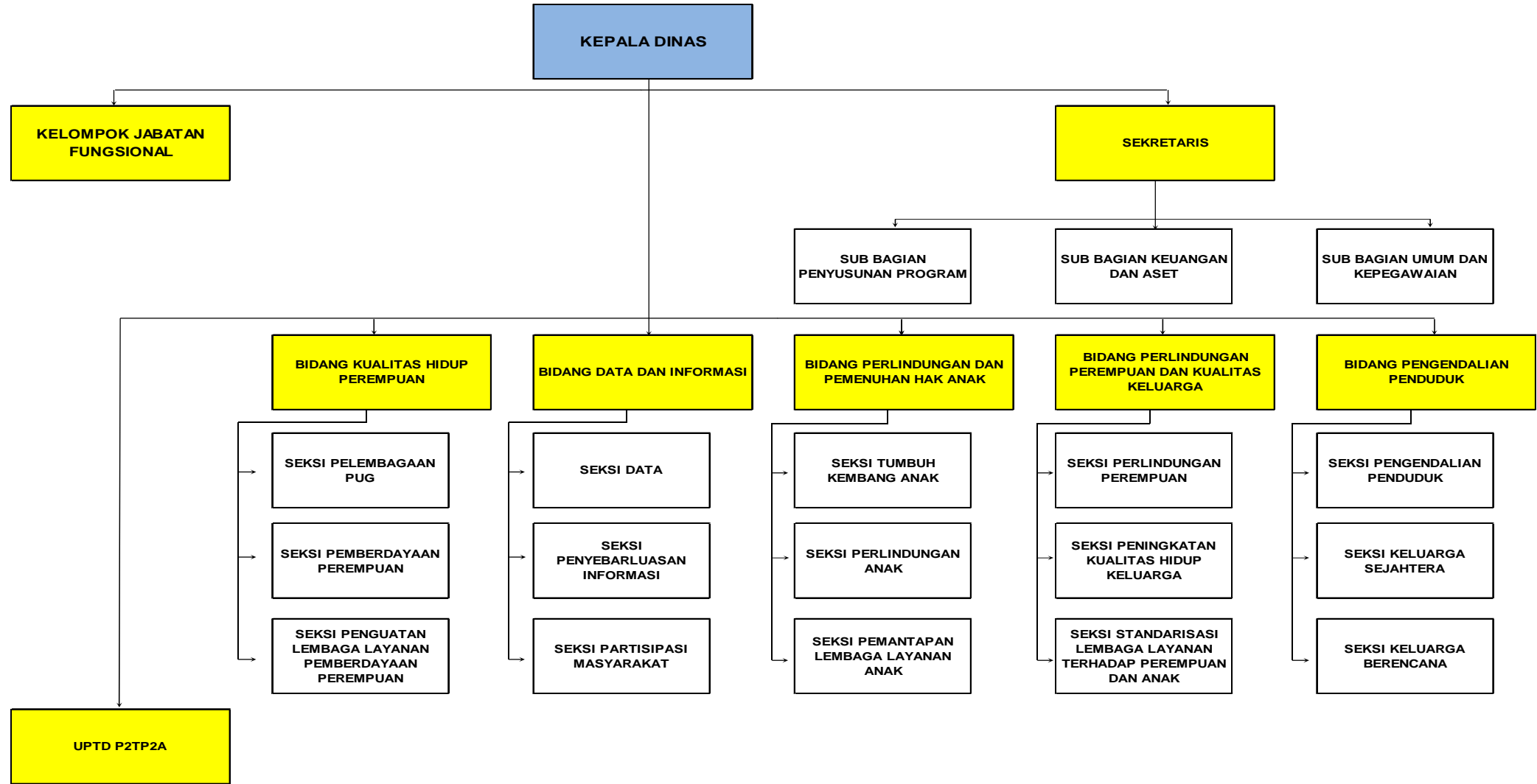
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pelembagaan PUG
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - 3) Kepala Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Data
 - 2) Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi

- 3) Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat
- c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - 2) Kepala Seksi Perlindungan Anak
 - 3) Kepala Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
 - 2) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
 - 3) Kepala Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk.
 - 2) Kepala Seksi Keluarga Sejahtera
 - 3) Kepala Seksi Keluarga Berencana
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut pada gambar 1.1 :

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



E. Kondisi Kepegawaian

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per desember 2018 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	19	35	54
2.	Honorer	-	-	-
3.	PHL / Kontrak	8	10	18
Jumlah		27	45	72

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	6	5	11
2.	Golongan III	9	27	36
3.	Golongan II	4	3	7
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		19	35	54

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	5	9	14
4.	D3	1	4	5
5.	S1	6	19	25
6.	S2	6	4	10
7.	S3	-	-	-
Jumlah		18	36	54

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir, namun yang perlu diingat bahwa dalam prinsip manajemen organisasi yang baik adalah tingkatan *low mangement* komposisinya harus lebih banyak

daripada tingkat *middle mangement* . Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	1	-	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	6	2	3	5
3.	Kasubbag / Kasubbid	Esselon IV	16	7	9	16
4.	Fungsional Tertentu / Arsiparis	Esselon V	1	-	1	1
Jumlah			24	10	13	23

Tabel 1.5

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	1	-	1	11
2.	Pembina Tk. I	IV / b	2	5	7	
3.	Pembina	IV / a	3	-	3	
4.	Penata Tk. I	III / d	4	10	14	36
5.	Penata	III / c	-	4	4	
6.	Penata Muda Tk. I	III / b	5	7	12	
7.	Penata Muda	III / a	-	6	6	
8.	Pengatur Tk. I	II / d	-	2	2	7
9.	Pengatur	II / c	2	-	2	
10.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	2	1	3	
11.	Pengatur muda	II / a	-	-	-	
12.	Juru	I / c	-	-	-	
Jumlah			19	35	54	54

Komposisi jumlah PNS tahun 2018 sebanyak 54 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, ternyata terjadi penggelembungan piramida di tingkat *middle mangement* atau level PNS pada Golongan III sebanyak 36 orang atau sebesar 66,67 %, sedangkan pada level *low mangement* atau PNS pada Golongan II dan golongan I sebanyak 7 orang atau sebesar 12,96 %, artinya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan masih belum bisa dikatakan ideal. Dari kondisi tersebut di atas, kondisi idealnya dari PNS yang ada pada tingkat *top mangement* atau Gol. IV sebesar 25 % atau sebanyak 14 orang, untuk Golongan III pada tingkat *middle mangement* sebesar 30 % atau sebanyak 16 orang, sedangkan pada tingkat *low mangement* atau PNS Golongan II dan I sebesar 45 % atau sebanyak 24 orang.

Tabel 1.6
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia

No	Umur	Tahun 2017				Jumlah	%	Ket
		L	%	P	%			
1.	< 30 Tahun	-	-	3	100	3	5,56	Produktif (31,48 %)
2.	30 - 39 Tahun	6	42,86	8	57,14	14	25,93	
3.	40 - 49 Tahun	4	33,33	8	66,67	12	22,22	Umum (22,22 %)
4.	≥ 50 tahun	8	32	17	68	25	46,30	Kurang Produktif (46,30 %)
Jumlah		18	33,33	36	66,67	54	100	

Dengan memperhatikan Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang usia produktif (< 40 tahun) tergolong minim atau sebesar 31,48 %, justru sebagian besar PNS berada pada kondisi usia kurang produktif (≥ 50 tahun) sebesar 46,30 % dan sampai dengan akhir tahun 2018, terdapat PNS yang akan memasuki Pensiun sebanyak 6 orang atau 11,11 %.

Kondisi ideal adalah seperti bentuk piramida, dimana Jumlah PNS termasuk dalam katagori produktif harus lebih banyak untuk menunjang produktivitas kerja, dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS dalam usia produktif < 40 tahun sebesar 50 % atau sebanyak 27 orang. Kondisi riil jumlah PNS dalam usia produktif sebanyak 17 orang.
- PNS yang berusia 40 – 49 tahun sebesar 30 % atau sebanyak 16 orang. Kondisi riil jumlah PNS pada kisaran umur tersebut sebanyak 12 orang.
- PNS dalam katagori kurang produktif (> 50 tahun) sebesar 20 % atau sebanyak 11 orang. Kondisi riil jumlah PNS di atas 50 tahun sebanyak 25 orang.

F. Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah a Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
 - b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPPO
 - c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
2. Perlindungan Anak :
 - a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
 - b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
 - c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung anak-anak untuk berkembang

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Aspek Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta struktur organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2018 meliputi RPJMD 2016 – 2021, RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 dan penetapan kinerja tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD tahun 2016 – 2021
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

A. RPJMD Tahun 2016 – 2021

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2016 – 2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusun rencana strategis SKPD.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan;
- e. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
- f. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021;

- g. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
- h. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 4 aspek yang menjadi gambaran umum kondisi daerah. Antara lain :

- 1. Aspek Geografis dan Demografi
- 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 3. Aspek Pelayanan Umum
- 4. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan ke 4 (empat) aspek tersebut perencanaan kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah masuk kedalam Aspek Pelayanan Umum pada “fokus pelayanan urusan wajib(non pelayanan dasar) “ bagian pemberdayaan perempuan dimana dijelaskan Salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan pada saat ini adalah sejauh mana pembangunan tersebut melibatkan peran dan kesetaraan gender dalam proses maupun hasil-hasil pembangunan. Indikator utamanya adalah melalui pengukuran capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, juga merupakan ukuran pembangunan manusia, meliputi komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG adalah rasio IPM (Indeks Pembangunan Manusia) perempuan dengan laki-laki dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM yaitu : Angka harapan hidup (kesehatan), Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), Sumbangan pendapatan (ekonomi), yang disajikan menurut jenis kelamin. Sedangkan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG

menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan laki-laki.

B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra telah mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

“Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 4 (empat) Misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.
- 2) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Peformulaan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan. Dengan berdasarkan

pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 diformulakan sebagai berikut :

- Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
- Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
- Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak
- Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak
- Tujuan5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Sasaran

Berdasarkan peformulaan tujuan, maka diformulakan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai tahunan selama periode Renstra. Peformulaan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
		Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif
			Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
2.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan
		Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
3.	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
			Rasio anak korban kekerasan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
4	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP (skor)
6.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS
			Rata-rata jumlah anak per Keluarga
		Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi
		Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta RPJMD 2016 - 2021.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal *business process* (peningkatan kapasitas jaringan internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016 - 2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
		Rasio anak korban kekerasan
	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP (skor)
	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga
	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi
	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

C. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 dan surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE/321/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

- 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Penetapan kinerja SKPD yang telah sepakati pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,14
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	28,89
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,31
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0244
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	28,57
		Rasio anak korban kekerasan	0,244
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	8,89

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,31
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,2
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,806
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	19,4

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja setiap sasaran secara keseluruhan dan akan disimpulkan apakah berhasil atau gagal masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Data dan informasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	105,61%
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	100,12%
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	233,41%
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100%
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	53,93%
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	100%
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	313,91%
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100%
9.	Menurunnya angka kelahiran	137,88%
10.	Meningkatnya akseptor KB	97,64%
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	171,56%
Rata-rata persentase Capaian Sasaran		137,60%

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 berdasarkan pengukuran pada indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	2,14	2,26	105,61
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	persen	28,89	28,89	100
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	persen	33,31	33,39	100,24
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	rasio	0,0244	0.0105	233,41
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	persen	100	100	100
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	persen	28,57	14,29	50
	Rasio anak korban kekerasan	rasio	0,0244	0,0422	172,73
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	persen	100	100	100
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	persen	8,89	27,91	313,91
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	skor	B	B	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,31	2,50	92,40
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	1,2	0,66	182,37
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	rasio	0,806	0,787	97,64
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	19,4	11,31	171,56

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal mendukung Visi dan Misi pemerintah daerah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam “Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata” dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia. dimana hal tersebut tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, dengan bertanggungjawab dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Terdapat beberapa indikator pelayanan yang harus dijawab guna mendukung pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD Point 1-2

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2017		2018		
		T	R	T	R	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	10,41	6,50	10,88	7,58	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2018
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	21,58	88,76	23,59	94,51	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2018

Komponen penghitungan dari Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta adalah sebagai berikut :

- a. Pekerja Perempuan dilembaga Pemerintah adalah jumlah PNS perempuan di Kab/Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2018 berjumlah 33.250 orang, dan pada tahun 2017 berjumlah 30.339 orang;
- b. Pekerja perempuan di Lembaga Swasta adalah pekerja perempuan yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar , berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar , Pekerja bebas, Pekerja keluarga/tak dibayar. Atau didapat dari jumlah perempuan bekerja (angkatan kerja) dikurangi dengan jumlah perempuan bekerja di lembaga pemerintah, pada tahun 2018 berjumlah 414.308, dan pada tahun 2017 berjumlah 414.003 orang;
- c. Tenaga kerja perempuan adalah perempuan yang masuk kedalam angkatan kerja Perempuan dan berusia 15 tahun ke atas, pada tahun 2018 berjumlah 438.391, dan pada tahun 2017 berjumlah 466.553 orang;
- d. Formula yang digunakan pekerja perempuan dilembaga pemerintah/swasta dibagi jumlah Tenaga kerja perempuan di kali 100.

Perhitungan secara kumulatif berdasarkan formula tentang jumlah perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018 sebesar : $(33.250/438.391)*100 = 7,58\%$, apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar : $(30.339/466.553)*100 = 6,50\%$, maka terjadi kenaikan sekitar 1,08%. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen penghitungan yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu: " jumlah perempuan di lembaga pemerintah" sekitar 2.911 orang, namun demikian jumlah tenaga kerja perempuan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 28.162 orang.

Untuk jumlah perempuan dilembaga swasta pada tahun 2018 sebesar : $(414.308/438.391)*100 = 94,51\%$, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar : $(414.003/466.553)*100 = 88,74\%$, maka terjadi kenaikan sekitar 5,77%. Hal ini dipengaruhi oleh komponen yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu : "jumlah perempuan dilembaga swasta" sekitar 305 orang.

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD Point 3

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2017		2018		
		T	R	T	R	
3	Rasio KDRT	0,0244	0,0529	0,0213	0,0992	Sumber data : Simponi KPPA, P2TP2A Provinsi Kalteng, kampungkb.bkkbn.go.id

Indikator penurunan Rasio KDRT merupakan rincian dari Jumlah kasus KDRT dibagi jumlah rumah tangga dikali 1000

- a. Jumlah kasus KDRT pada tahun 2018 tercatat sebanyak 67 kasus berdasarkan angka yang tercatat pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah pada simponi KPPA, jika dibandingkan dengan tahun 2017 tercatat ada 35 kasus.
- b. Jumlah rumah tangga pada tahun 2018 berjumlah 675.690 dan pada tahun 2017 berjumlah 661.243.
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2018 = $(67/675.690) \times 1000 = 0,0992$, jika dibandingkan dengan dengan tahun 2017 $= (35/661.243) \times 1000 = 0,0529$.
- d. Capaian pada tahun 2018 sebesar 0,0992 artinya melampaui 0,0779 dari target 0,0213, dan meningkat 0,0463 dari capaian tahun sebelumnya.
- e. Capaian pada tahun 2018 adalah 0,0992 artinya bahwa pada tahun 2018 setiap 1000 rumah tangga terdapat 0,0992 kasus KDRT atau dengan pendekatan per 10.000 rumah tangga terdapat 0,9 kasus KDRT.

Di satu sisi apabila memperhatikan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2018 , terdapat peningkatan sebanyak 32 kasus dari tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap tindakan promotif preventif pemerintah dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai meningkat yang ditunjukan dengan meningkatnya jumlah laporan terhadap kasus KDRT ke lembaga atau unit layanan. Namun disisi lain masih tingginya jumlah kasus memerlukan perhatian yang serius dalam usaha penanganannya, dengan mempertimbangkan jumlah dan kompetensi SDM serta sarana prasarana yang memadai untuk mewujudkan layanan yang optimal bagi masyarakat terutama perempuan dan anak.

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD Point 4

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2017		2018		
		T	R	T	R	
4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	0,30	7,56	0,23	11,45	Sumber data : BPS profil anak bekerja 2017 edisi 2018

Indikator persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur merupakan rincian dari Jumlah anak usia dibawah 12 tahun yang bekerja dibagi jumlah anak angkatan kerja yang bekerja pada rentang usia 10-17 tahun dikali 100, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah anak usia dibawah 12 tahun yang bekerja pada tahun 2018 adalah 3.745 orang , pada tahun 2017 sebesar 2.486
- b. jumlah anak yang bekerja pada tahun 2018 adalah 32.704, pada tahun 2017 sebesar 32.904
- c. persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur pad tahun 2018 = $(3.745/32.704)*100=11,45\%$
- d. pada tahun 2017 persentase jumlah tenaga kerja anak dibawah umur = $(2.486/32.904)*100=7,56\%$

Capaian pada tahun 2018 adalah 11,45% atau mengalami kenaikan sebesar 3,89% jika dibandingkan dengan capaian pada 2017 sebesar 7,56%. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen penghitungan yang mengalami kenaikan yaitu: "jumlah anak usia 12 tahun kebawah yang bekerja" walaupun jumlah anak yang bekerja pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 200 anak dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 angka anak bekerja masih relatif tinggi, keberhasilan dalam menekan angka tenaga kerja anak dibawah umur masih belum optimal atau dapat dikatakan bahwa tindakan eksploitasi terhadap anak masih tinggi. kondisi ideal yang diharapkan adalah tidak ada lagi anak dibawah umur yang bekerja.

Hal yang perlu dikhawatirkan adalah dari seluruh anak usia 10-17 tahun yang bekerja (32.704 anak) ada sebanyak 11,45 persen (3.745 anak) yang bekerja pada usia 10-12 tahun. Padahal menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 anak pada kategori umur tersebut tidak diperbolehkan bekerja, meskipun pekerjaan yang dilakukan mereka termasuk pekerjaan ringan

keberhasilan pemerintah dalam menekan jumlah pekerja anak atau menghentikan eksploitasi terhadap anak sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi keluarga. Selama mereka terkungkung dalam cara pandang yang keliru, bahwa anak merupakan faktor produksi tenaga kerja, eksploitasi terhadap anak

akan terus berlanjut. Di atas itu semua, eksploitasi terhadap anak pada dasarnya tidak terlepas dari alasan ekonomi keluarga. Tak bisa dimungkiri, kondisi serba kekurangan dan tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga seringkali merupakan penyebab utama sehingga anak dipaksa bekerja. Karena itu, upaya paling mendasar yang harus dilakukan pemerintah untuk menghentikan eksploitasi terhadap anak sejatinya adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD Point 5

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2017		2018		
		T	R	T	R	
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,06	53,61	54,09	49,19	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2018

Indikator partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan rincian dari Jumlah perempuan tergolong angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas dikali 100, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah perempuan tergolong angkatan kerja perempuan pada tahun 2018 berjumlah 438.391, pada tahun 2017 berjumlah 466.553
- b. Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas pada tahun 2018 berjumlah 891.211, pada tahun 2017 berjumlah 870.337
- c. Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2018 = $(438.391/891.211)*100$
= 49,19%
- d. Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2017 = $(466.553/870.337)*100$
= 53,61%

Capaian pada tahun 2018 adalah 49,19% atau mengalami penurunan sebesar 4,42% jika dibandingkan dengan capaian pada 2017 sebesar 53,61%. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen penghitungan yang mengalami penurunan yaitu: " Jumlah perempuan tergolong angkatan kerja perempuan" dan "Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas " yang menandakan meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia kerja.Walaupun capaian ini masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 87,20%.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD Point 6

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2017		2018		
		T	R	T	R	
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	Sumber data : P2TP2A Provinsi Kalteng

Indikator penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan rincian dari Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan ditambah jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani tuntas di kali 100, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 berjumlah 13, pada tahun 2017 berjumlah 23
- b. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 berjumlah 40, pada tahun 2017 berjumlah 45
- c. Jumlah pengaduan yang ditangani tuntas oleh P2TP2A pada tahun 2018 berjumlah 53, pada tahun 2017 berjumlah 68
- c. Penyelesaiaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan tahun 2018 = $((13+40)/53*100=100\%$
- d. Penyelesaiaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tinda kekerasan tahun 2017 = $((23+45)/68*100=100\%$
- e. Capaian pada tahun 2018 adalah 100% yang menunjukan bahwa dari seluruh pengaduan kasus yang terjadi dapat diselesaikan seluruhnya sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku di P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 7- 8

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2017		2018		
		T	R	T	R	
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,25	77,87	79,86	79,36	Sumber data : BPS <u>Formula :</u> 1/3[Xede(1)+Xede(2)+Linc-Dist] Xede(1)=Xede untuk harapan hidup Xede(2)=Xede untuk pendidikan Linch-Dist=Indeks Distribusi pendapatan
8	Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,36	89,25	90,33	88,91	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2017 <u>Formula :</u> IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan
Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Dimensi Pengukuran IPG

Dimensi	Indikator	IPG/GDI
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	

Tabel 3.10

Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru

	Lama	Baru
Penghitungan	IPG = IPM tertimbang jenis kelamin	IPG = Rasio IPM perempuan dengan laki-laki
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none">• IPG harus dianalisis bersama IPM• Selisih IPG dg IPM merupakan gap capaian gender• Semakin mendekati angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki• Jika IPG = IPM, artinya tidak ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki	<ul style="list-style-type: none">• IPG dapat diinterpretasikan sendiri• Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki• IPG < 100, capaian perempuan < capaian laki-laki• IPG = 100, capaian perempuan sama dengan laki-laki• IPG > 100, capaian perempuan > capaian laki-laki

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

- IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.
- IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
- Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

Tabel 3.11
Dimensi Pengukuran IDG

Dimensi	Indikator	IDG/GEM
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan	
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-2 & Perempuan	

Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berdasarkan capaian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 -2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian IDG dan IPG 2014 - 2017

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Kalimantan Tengah	89.33	89.25	89.07	88.91	77.90	77.87	78.23	79.36
Kotawaringin Barat	90.04	90.04	-	91.76	64.48	63.98	-	63.31
Kotawaringin Timur	86.07	86.79	-	87.73	69.91	70.23	-	67.87
Kapuas	95.36	95.65	-	96.59	62.46	68.21	-	71.50
Barito selatan	93.46	93.34	-	93.02	84.02	83.88	-	81.67
Barito utara	85.50	85.62	-	85.16	83.51	84.35	-	86.20
Sukamara	90.14	90.09	-	91.24	60.27	61.24	-	59.78
Lamandau	91.06	91.55	-	91.97	54.65	53.55	-	54.13
Seruyan	88.87	88.42	-	88.64	69.47	69.70	-	70.13
Katingan	83.88	84.78	-	85.51	62.33	60.79	-	66.87
Pulang Pisau	90.27	90.25	-	91.70	69.38	69.32	-	70.14
Gunung Mas	91.80	92.00	-	91.74	81.01	79.98	-	78.74
Barito Timur	87.75	88.16	-	88.36	66.01	75.80	-	76.46
Murung Raya	81.53	82.31	-	82.92	65.16	65.82	-	66.93
Kota Palangka Raya	93.80	94.30	-	94.42	79.59	79.83	-	79.94

Tabel 3.13

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 9

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2017		2018		
		T	R	T	R	
9	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,10	0,58	1,2	0,66	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka, profil anak bekerja

Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan rincian dari Jumlah penduduk anak usia 0-18 tahun di bagi dengan jumlah rumah tangga/keluarga, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk anak pada tahun 2018 berjumlah 444.615, pada tahun 2017 berjumlah 383.058
- b. Jumlah rumah tangga pada tahun 2018 berjumlah 675.690, pada tahun 2017 berjumlah 661.243
- c. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2018 = $444.615/675.690=0,66$
- d. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2017 = $383.058/661.243=0,58$
- e. Capaian pada tahun 2018 adalah 0,89 yang menunjukan secara umum kondisi di Provinsi kalimantan tengah bahwa dalam setiap rumah tangga rata-rata memiliki 0-1 orang anak, hal ini menunjukan keberhasilan program keluarga berencana dalam mengendalikan laju angka kelahiran.

Tabel 3.14

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 10 -11

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2017		2018		
		T	R	T	R	
10	Rasio akseptor KB	0,797	0,792	0,806	0,787	Sumber data : BKKBN <u>Formula :</u> Jumlah peserta KB aktif dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama
11	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	382.023	373.140	394.756	339.042	Sumber data : BKKBN <u>Formula :</u> Jumlah peserta KB aktif dalam 1 tahun

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu)

tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. pada tahun 2018 Jumlah peserta KB aktif 339.042 dan Jumlah Pasangan Usia Subur 403.243 jadi rasio akseptor KB = $339.042/403.243= 0,841$, hal ini menunjukan bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam berKB sudah mulai meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 rasio akseptor KB = $373.140/471.099= 0,792$. meningkatnya akseptor KB menunjukan kesadaran masyarakat terutama Pasangan usia subur (PUS) dalam menyadari pentingnya KB selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga mendapatkan tanggapan yang positif.

Jumlah pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB aktif per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Data PUS dan Peserta KB Aktif 2016 - 2018

Provinsi / Kabupaten / Kota	Pasangan Usia Subur (PUS)			Peserta KB Aktif		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Kalimantan Tengah	471776	471099	430799	368652	373140	339042
Kotawaringin Barat	45852	44388	42782	32639	31976	30434
Kotawaringin Timur	78998	86171	94853	61720	66400	70239
Kapuas	83413	82698	28404	64456	67053	22940
Barito selatan	27286	17288	21823	20854	12968	16822
Barito utara	24437	23980	23817	19387	18971	19134
Sukamara	7858	11287	13504	6427	9615	27615
Lamandau	14135	14298	14854	11139	11949	14518
Seruyan	25332	18833	21994	18128	14438	10672
Katingan	36212	36682	19471	28338	28784	12707
Pulang Pisau	22288	21054	20600	18373	16604	16768
Gunung Mas	28927	23563	21994	23212	17595	17217
Barito Timur	14231	24210	23112	11461	18981	19171
Murung Raya	19440	20547	22049	15440	17752	18236
Kota Palangka Raya	43367	46100	48799	37078	40054	42569

Tabel 3.16
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 12

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2017		2018		
		T	R	T	R	
12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	170.497	243.211	164.891	244.060	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1992, keluarga di Indonesia dapat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dan untuk melakukan pembagian tersebut diperlukan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya pengetahuannya masih sederhana. Berikut ini merupakan pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan serta indikator yang menjadi syarat atau ukurannya:

1. Keluarga Pra- Sejahtera

Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi.

2. Keluarga Sejahtera Tingkat I (KS I)

Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah
- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
- Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.

3. Keluarga Sejahtera Tingkat II (KS II)

Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5), serta ditambah indikator sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing
- Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk

- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru setahun terakhir.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah
- Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing
- Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan tetap
- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca tulisan latin
- Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini
- Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang maka keluarga yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS) sedang menggunakan kontrasepsi saat ini

4. Keluarga Sejahtera Tingkat III (KS III)

Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Apapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14 pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:

- Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
- Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
- Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tepat tinggal
- Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan
- Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

5. Keluarga Sejahtera Tingkat III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai Keluarga Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi

indikator 1-21 ditambah indikator sebagai berikut :

- Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
- Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

Pada tahun 2018 jumlah Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera di Provinsi kalimantan tengah berjumlah 244.060, jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi pada tahun 2017 yang berjumlah 243.211. hal ini menunjukan terjadinya peningkatan jumlah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya maupun yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.

Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera 1		
	2016	2017	2018
Kalimantan Tengah	55.110	243.211	244.060
Kotawaringin Barat	2.325	22.678	22.678
Kotawaringin Timur	6.840	37.527	38.413
Kapuas	16.715	41.520	41.519
Barito selatan	2.392	18.299	18.247
Barito utara	2.516	15.479	15.479
Sukamara	5.084	4.444	4.444
Lamandau	1.367	8.205	8.205
Seruyan	366	8.432	8.448
Katingan	863	16.366	16.366
Pulang Pisau	3.719	15.284	15.284
Gunung Mas	2.897	9.588	9.588
Barito Timur	1.668	13.402	13.402
Murung Raya	2.427	7.607	7.607
Kota Palangka Raya	5.931	24.380	24.380

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada bagian ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1	Tingkat Capaian
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	105,61%

Tabel 3.18
Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persen	Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng/ Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dikali 100	1,71	2,44	114,22	2,14	2,26	105,61

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender terdiri dari 1 indikator yaitu :

Indikator : Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng

- a. Jumlah BL Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 sebesar Rp. 2.178.495.043.274 dan pada tahun 2017 Rp. 1.561.860.656.479
- b. Jumlah ARG pada Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 Rp. 49.237.200.000 dari 55 Program dan 84 kegiatan, dan pada tahun 2017 Rp. 38.178.340.187 dari 51 Program dan 55 Kegiatan
- c. Target pada tahun 2018 sebesar 2,14 Persen atau Rp. 46.619.793.926, target pada tahun 2017 sebesar 2,17 atau Rp. 33.892.376.202
- d. Realisasi pada tahun 2018 = $(38.178.340.187 / 1.561.860.656.479) \times 100 = 2,26\%$
- e. Sedangkan realisasi pada tahun 2017= $(49.237.200.000 / 2.178.495.043.274) \times 100 = 2,44\%$
- f. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(2,26 / 2,14) \times 100 = 105,61\%$
- g. Capaian Indikator kinerja pada tahun 2017= $(2,44 / 1,71) \times 100 = 114,22\%$

Pada tahun 2018 realisasi capaian indikator menurun sebesar 0,3%, namun total belanja langsung yang ARG pada Provinsi Kalimantan Tengah meningkat sebesar Rp. 11.058.859.813 dan total Belanja Langsung Provinsi Kalimantan Tengah meningkat sebesar Rp. 616.634.386.795 dari tahun sebelumnya.

Daftar perangkat daerah beserta program dan kegiatan yang ARG pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Program Kegiatan ARG Tahun 2018

NO.	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan Pengendalian Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Penguatan Koordinasi Kesehatan Ibu dan Anak	75.000.000
			Kegiatan Penguatan Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	150.000.000
			Kegiatan Penguatan Tim Koordinasi Sistem Layanan Rujuk Terpadu (Slrt)	75.000.000
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyuluhan Penegakan Perda/Pergub	150.000.000
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pendayagunaan Dan Tindak Lanjut Pengawasan Ketenagakerjaan	Peningkatan Perlindungan Pekerjaan Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	192.500.000
4	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.316.700.000
5	Dinas Tanaman Pangan Hultikultura dan Petrernakan	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengembangan Kawasan Sentra Agibisnis Hortikultura	2.437.100.000
			Pengembangan Bawang Merah 35 Ha Dan Cabe 35 Ha	-
6	Biro Protokol Dan Komunikasi Publik Setda Prov. Kalteng	-	-	-
7	Biro Administrasi Pemerintahan Setda Prov. Kalteng	-	-	-
8	Dinas Kehutanan	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	300.000.000
9	Dinas Sosial	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Sosial Program PM2Ldan PMKS	300.000.000

NO.	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
10		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	165.000.000
			Mengikuti Bimbingan Teknis Dan Pelatihan	250.000.000
			Pelatihan Pemetaan Tematik Wilayah Serangan Opt Perkebunan	100.000.000
			Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman(Opt) Perkebunan	100.000.000
			Diklat Non Teknis	250.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Pengembangan Pelayanan Kepegawaian	75.000.000
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penyuluhan Dan Bimbingan Pemanfaatan Dan Produktivitas Lahan Tidur (Geber-Mlt)	1.700.000.000
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Peningkatan Ketahanan Pangan Dengan Pengembangan Diversifikasi Tanaman	530.000.000
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertemuan Teknis Petugas Pphpprovinsi Kalimantan Tengah	172.500.000
			Pengembangan Bokar Bersih Dan Komoditi Unggulan Lain	1.466.250.000
			Lomba Kelompok Tani	115.000.000
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	172.500.000
			Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	750.000.000
			Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (Pltb)	1.727.000.000
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan	17.000.000.000
			Pertemuan Kerjasama Mantri Tani Dan Mantri Statistik	200.000.000
			Sosialisasi Percontohan Kebun Bersih	825.000.000

NO.	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Koordinasi,Sinkronisasi Dan Validasi Data Statistik Perkebunan Kab/Kota Se-Kalteng	351.500.000
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Melalui Puisat Komunitas Kreatif	100.000.000
12	Biro Hukum Setda Prov Kalteng	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	360.000.000
		Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Ham	Pemasyarakatan Dan Pendidikan Ham	114.000.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantaun Kualitas Air	300.000.000
			Pemantauan Kualitas Udara	300.000.000
			Peningkatan Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan	-
			Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	-
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Peningkatan Pengelolaan Aparator Pengelolaan Persampahan	-
			Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	-
			Pembinaan Pengelolaan Persampahan	-
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-
		Program Perlindungan Dan Konservasi Sda	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Ke Sumber Sumber Air	-
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem	-
			Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan	-
			Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan	-
		Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sda	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehab Dan Pemulihan Cadangan SDA	-
			Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	-
		Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sda Dan Lh	Penyelenggaraan Pameran Lh Di Daerah	-
			Pembinaan Generasi Peduli Lingkungan Pemberian Anugerah Lingkungan Hidup Kalpataru	-

NO.	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov Kalteng	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran	140.000.000
15	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	80.000.000
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	150.000.000
	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Monitoring Dan Evaluasi Program	Rapat Kerja Pertambangan	-
		Pengawasan Dan Evaluasi Pertambangan	Sosialisasi Stop Peti	50.000.000
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi	80.000.000
18	Rsud Dr. Doris Sylvanus	Peningkatan Mutu Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	1.235.000.000
			Peningkatan Mutu Pelayanan	1.270.000.000
19	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Di Desa Tertinggal	65.000.000
20	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Operasi Katarak	600.000.000
			Pelayanan Kesehatan Lapangan	450.000.000
			Pengobatan Massal	472.500.000
		Perbaiki Gizi Masyarakat	Lomba Balita Dan Kampanye Pekan Asi	665.000.000
			Orientasi Petugas Dalam Menanggulangi Anemia Pada Ibu Hamil Dan Remaja Putri	142.800.000
			Talkshow Pekan Asi Dalam Rangka Meningkatkan Cakupan Asi Eksklusif Dan Cakupan Inisiasi Menyusui Dini (Imd)	135.000.000
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Mobil Vct	220.000.000
			Penguatan Kpad	180.000.000
			Penguatan Yayasan Kanker Indonesia Cab. Palangka Raya	200.000.000
		Program Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang	Monitoring Evaluasi Penjaringan Anak Usia Sekolah	276.360.000

NO.	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, Dan Anak Balita	165.000.000
			Pemeriksaan Faktor Resiko Ca Serviks Dan Payudara Pada Perempuan Usia 30-50 Thn	80.000.000
		Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular (Ptm)	Bimtek Ke Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa Dan Atau Napza	100.000.000
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Prov. Kalteng	Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan Desa	-
22	Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Prov. Kalteng	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	172.500.000
23	Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng	Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Prov. Kalteng	270.000.000
24	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan Dan Gizi Keluarga	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan Dan Gizi Keluarga	100.000.000
			Sosialisasi Diversifikasi Pangan Bagi Ibu-Ibu Kelompok Tani, Pkk	40.000.000
		Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Lomba Cipta Menu 3b Tingkat Provinsi/Nasional	140.000.000
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-
26	Sekretariat DPRD	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal Dan Responsif Gender	25.000.000
27	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan Capra Ipdn	120.000.000
28	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Peningkatan Sdm Pengelola Perpustakaan	Diklat Teknis, Sosialisasi Dan Penyuluhan Perpustakaan	120.000.000
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Sosialisasi Dan Advokasi Pug	225.000.000
			Monitoring Dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota	250.000.000

NO.	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
	Penduduk Dan Kb	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	150.000.000
			Sosialisasi Penyuluhan Tentang Pergaulan Bebas Bagi Pelajar (Sltp/Slta Sederajat)	
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (Gsi) Kabupaten Dan Kota Se Propinsi Kalteng	100.000.000
			Monitoring Dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu(GSI)	220.000.000
30	Rsj Kalawa Atei	Peningkatan Mutu Rumah Sakit (Arg)	Akreditasi Rs	137.500.000
			Peningkatan Mutu Pelayanan	465.290.000
31	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan Dan Perikanan (3.01.25)	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil (3.01.25.09)	200.000.000
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	200.000.000
32	Dinas Pendidikan	Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun li	Apresiasi Bunda Paud Dan Gugus Paud	250.000.000
33	Badan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Normal	150.000.000
			Asistensi Penyusunan Anjab,ABK,Dan SKP	120.000.000
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Skpd	260.000.000
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	500.000.000
		Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	600.000.000
			Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan APBD Se Kalimantan Tengah	300.000.000
34	Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan Bencana	Sosialisasi Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana di Kab/Kota	100.000.000
		Pemberdayaan Dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat	Pembentukan Lembaga Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Propinsi Kalimantan Tengah	140.000.000
35	Inspektorat	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah	Pemeriksaan Untuk Tujuan Tertentu	881.000.000

NO.	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Propinsi Kalimantan Tengah		
36	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Setda Propinsi Kalimantan Tengah	Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Pembinaan Pemuda/ Remaja Antar Agama	200.000.000
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Kompetensi Asn Peserta Diklat Pim III Dan Lingkup Provinsi Kalteng dan Kab/Kota	1.694.200.000
38	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Peningkatan Kapasitas SDM	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Dan Keahlian	230.000.000
39	Dinas Perhubungan	-	-	-
40	Dinas Kebudayaan Dan Parawisata	-	-	-
41	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	-	-
42	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-
43	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	-
44	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	-	-	-
45	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah 2018	Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil	100.000.000
		Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Pesisir	Pelatihan Akses Permodalan Masyarakat Pesisir	150.000.000
46	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)	Bimbingan Teknis Produk Kerajinan Dari Kawat Di Kota Palangka Raya	100.000.000
Jumlah		55 Program	84 kegiatan	49.237.200.000

Tabel 3.20
Program Kegiatan ARG Tahun 2017

NO.	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendidikan Politik Masyarakat	Sarasehan Peningkatan Wawasan Politik Perempuan	66.404.700
2	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi	65.200.000
3	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Air	200.000.000
4	RSUD dr. Doris Sylvanus	Peningkatan Mutu Rumah Sakit	Akreditasi RS	1.500.000.000
			Peningkatan Mutu Pelayanan	1.350.000.000
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	Pelatihan Bagi Perempuan di lembaga Pemerintah Desa/Kelurahan	100.000.000
6	Biro Organisasi SETDA Provinsi Kalteng	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pelaksanaan reformasi birokrasi di Prov.Kalteng	190.000.000
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan Iklim Investasi	Pemberdayaan Usaha Masyarakat, UKM dan Koperasi dengan Perusahaan di sekitar Perkebunan dan Pertambangan	200.000.000
8	Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pengawasan ketenagakerjaan	Peningkatan perlindungan pekerjaan perempuan dan penghapusan pekerja anak	175.000.000
9	Dinas pemuda Olah Raga	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pelatihan kewirausahaan pemuda	90.000.000
10	Dinas Sosial	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sosialisasi/Penyuluhan sosial program PM2L dan PMKS	200.000.000
11	Sekretariat DPRD	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan Formal dan responsif gender	25.000.000
12	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sosialisasi penegakan hukum, peraturan KPID terkait isi siaran dan P3 (pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS (standar program siaran)	100.000.000
13	Badan kepegawaian Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi penerimaan Calon PNS	533.983.587
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Master Of Caremony bagi PNS	120.000.000

NO.	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Pengetahuan Sikap dan Keterampilan	Sosialisasi peran serta anggota KORPRI perempuan dalam keseimbangan antara karier, keluarga maupun masyarakat	50.000.000
14	Badan penanggulangan bencana daerah	Dukungan manajemen dan teknis	Pembentukan lembaga forum pengurangan resiko bencana (FPRB)	100.000.000
15	Dinas kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	150.000.000
16	Biro Pemerintahan SETDA	Pemerintahan Umum	Rapat koordinasi kapasitas gender dalam Pemerintahan	100.000.000
17	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	90.000.000
18	Dinas PP dan PA, Pengendalian Kependudukan dan KB	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	TOT Fasilitator ARG	100.000.000
		Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rapat Koordinasi POKJATAP GSI Provinsi dan Kab/Kota	150.000.000
		Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Pembentukan POKJA Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	75.000.000
19	Dinas Perkebunan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Koordinasi, sinkronisasi dan validasi data statistik perkebunan kab/kota se kalteng dan pelatihan statistik	170.000.000
20	Biro administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Pembinaan Mental	Pembinaan Pemuda/Remaja antar agama	300.000.000
21	Dinas kelautan dan perikanan	Peningkatan daya saing usaha produk kelautan dan perikanan	Pengembangan usaha pengelolaan perikanan skala kecil	400.000.000
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan kawasan sentra agribisnis hortikultura	3.500.000.000
23	Dinas Perhubungan	Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi	Pemberdayaan sumber daya komunikasi dan informasi melalui pusat komunikasi kreatif	250.000.000
24	Badan Pengembangan	Pendidikan kedinasan	Pendidikan penjenjangan struktural	9.000.000.000

NO.	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
	Sumber Daya Manusia	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	3.353.500.000
25	Biro Administrasi Pembangunan	Pengembangan data/informasi	Koordinasi pengelolaan Sistem database Dukungan Kebijakan Nasional	312.133.750
			Seminar/Workshop/lok akarya	53.736.000
26	Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	OP kebersihan dan pemeliharaan taman (jumlah perempuan = 26 org)	3.851.950.000
27	Inspektorat	-	-	0
28	Biro Hukum	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sosialisasi produk Hukum Daerah	3.160.445.000
29	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Monitoring dan evaluasi program	Rapat kerja pertambangan	150.000.000
30	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Pelayanan Operasi Katarak	435.000.000
		Perbaikan gizi Masyarakat	Lomba Balita dan Kampanye Pekan Asi	350.000.000
31	Biro Umum SETDA	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	850.000.000
32	Rumah Sakit Jiwa KALAWA ATEI	Pelayanan Adminstrasi Kantor	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	150.000.000
33	Dinas Pendidikan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	100.000.000
		Pendidikan Non Formal	Sosialisasi PUG Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi	625.394.250
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	130.000.000
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan	Diklat Teknis, Sosialisasi dan penyuluhan perpustakaan	183.152.900
36	Badan Penghubung di Jakarta	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40.000.000
37	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pengembangan industri kecil dan menengah	Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Dasar	80.000.000
38	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengembangan Nilai Budaya	Gita Bahana Nusantara	125.000.000
39	BAPPEDA dan LITBANG	Perencanaan Pembanguna Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Perencanaan penanggulangan kemiskinan	240.000.000
40	Badan Keuangan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan Formal	150.000.000

NO.	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
	Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	600.000.000
		Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan keuangan Kab/Kota	Rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah kab/kota	500.000.000
41	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Satgas Kaji Ulang	453.600.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fasilitasi Anggota POKJA ULP	540.000.000
			Bimtek Peraturan perundangan-undangan	393.840.000
42	Biro Humas dan Protokol	Penyebaran Informasi, kehumasan dan keprotokolan	Pengaturan Keprotokolan Pimpinan dan Keprotokolan Tamu Pemerintahan	1.000.000.000
			Liputan Media Cetak, Elektronik dan penunjang Operasional Kehumasan	1.000.000.000
43	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	-	-	0
44	Dinas perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-	-	0
45	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	0
Jumlah		51 Program	55 kegiatan	38.178.340.187

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
 - 1. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merespon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup organisasinya masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Belum adanya regulasi teknis yang mendukung terintegrasinya perspektif gender didalam proses penyusunan Program dan Kegiatan di masing-masing lembaga di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Masih rendahnya komitmen para pemangku kebijakan di masing-masing lembaga di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Terbatasnya referensi untuk menggali dan mengidentifikasi isu gender yang ada
- d. Terbatasnya kesediaan data sektoral /data terpilah menurut jenis kelamin dimasing-masing sektor pembangunan.
- e. Perubahan struktur organisasi yang berakibat adanya perubahan personel kelembagaan daerah yang silih berganti dalam waktu singkat dan tentunya belum memahami permasalahanan gender.

Tantangan / Hambatan

Namun demikian dari keberhasilan capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai *gender machinery* di daerah belum optimal.
- b. Keterbatasan Akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan
- c. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan;
- d. Terjadi perubahan struktur organisasi daerah, sehingga menyebabkan efektifitas sosialisasi, pelatihan, advokasi tidak optimal;
- e. Adanya pemahaman tentang PUG dan peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih bervariasi;
- f. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran;
- g. Sebagian besar Perangkat Daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah.
- h. Terjadinya perkembangan dan dinamika perubahan sosial, politik, dan hukum serta pada pembangunan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam program dan strateginya.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui adanya advokasi khususnya kepada Kepala SKPD (unit eselon II), DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lingkup Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan (responsif gender) dan percepatan pelaksanaan PUG serta inovasi dalam pelaksanaan PUG.

- b. Memperbanyak fasilitator di daerah agar penyusunan anggaran bisa dilaksanakan sampai pada tingkat kabupaten/kota, dan kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang responsif gender.
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan PUG khususnya bagi internal Dinas PP dan PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta SDM dari Perangkat Daerah strategis lainnya.
- d. Pendampingan secara intensif dalam rangka penguatan kelembagaan PUG bidang Politik, Sosial dan Hukum di lingkup organisasi dan daerah mitra kerja;
- e. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dalam rangka implementasi PUG;
- f. Memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi tentang pelaksanaan PUG
- g. Penguatan Kelembagaan PUG melalui Pembentukan POKJA, gender focal point dan bentuk jejaring kerja lainnya
- h. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan memanfaatkan data gender.

Sasaran 2	Tingkat Capaian
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	100,12%

Tabel 3.21
Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	Jumlah perempuan di lembaga legislatif (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD) dikali 100	28,89	28,89	100	28,89	28,89	100
Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Persen	Jumlah Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga dibagi total pendapatan dikali 100	33,26	33,26	100	33,26	33,39	100,24

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan terdiri dari 2 indikator yaitu :

Indikator : Persentase perempuan di lembaga legislatif

- a. Jumlah anggota legislatif laki-laki Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018
laki-laki = 32 orang
- b. Jumlah anggota legislatif perempuan Provinsi Kalimantan Tengah tahun
2018 laki-laki = 13 orang
- c. Realisasi indikator Persentase perempuan di lembaga legislatif = $(13 / 32) * 100 = 28,89\%$
- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(28,89 / 28,89) * 100 = 100\%$

Pada tahun 2018 target yang ditetapkan 28,89% realisasinya 100%, jumlah anggota legislatif Provinsi Kalimantan Tengah perempuan berjumlah 13 orang dari total 45 orang anggota legislatif atau $= (13/45) * 100 = 28,89\%$

Pada tahun 2017 target yang ditetapkan 28,89% realisasinya 100%, jumlah anggota legislatif Provinsi Kalimantan Tengah perempuan berjumlah 13 orang dari total 45 orang anggota legislatif atau $= (13/45) * 100 = 28,89\%$

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-

kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Tabel 3.22

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan partai dan Jenis Kelamin

NO.	NAMA PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Partai Nasional Demokrat	2	3	5
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	1	3
3	Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan	6	5	11
4	Partai Golkar	4	1	5
5	Partai Gerindra	4	2	6
6	Partai Demokrat	5	-	5
7	Partai Amanat Nasional	4	1	5
8	Partai Persatuan Pembangunan	3	-	3
9	Partai Hanura	1	-	1
10	PKP Indonesia	1	-	1
Jumlah		32	13	45

Indikator : Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Pada tahun 2018 target yang ditetapkan 33,31% realisasinya 100,24%, Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai 33,39% dan realisasi berdasarkan target = $(33,39/33,31) \times 100 = 100,24\%$

Pada tahun 2017 target yang ditetapkan 33,26% realisasinya 100%, Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 mencapai 33,31% dan realisasi berdasarkan target = $(33,31/33,31) \times 100 = 100\%$

kebutuhan partisipasi wanita sangat besar mengingat ditetapkan model pembangunan yang berbasis pada masyarakat. wanita memegang sejumlah fungsi sentral dalam keluarga dan sekaligus merupakan sumber daya ekonomi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan pria, maka sumbangan pendapatan perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di tingkat keluarga, indikator ini menjadi salah satu variabel pengukuran dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) pada dimensi “Kehidupan yang layak” IPG dapat

digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Tabel 3.23

Sumbangan Pendapatan Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah 2014 - 2018

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Sumbangan pendapatan perempuan (%)			
	2014	2015	2016	2017
Kalimantan Tengah	33.13	33.26	33.26	33.39
Kotawaringin Barat	23.02	23.21	-	23.55
Kotawaringin Timur	25.42	25.82	-	25.77
Kapuas	28.05	27.04	-	27.57
Barito Selatan	38.30	38.05	-	38.11
Barito Utara	42.72	43.72	-	43.73
Sukamara	18.61	19.07	-	19.47
Lamandau	25.72	27.71	-	27.81
Seruyan	26.01	26.62	-	26.98
Katingan	28.89	28.99	-	29.37
Pulang Pisau	22.15	22.48	-	22.94
Gunung Mas	55.83	51.33	-	51.04
Barito Timur	41.89	43.37	-	43.43
Murung Raya	28.83	29.39	-	29.35
Kota Palangka Raya	31.40	31.87	-	32.10

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender guna meningkatnya partisipasi perempuan, antara lain adalah :
 - 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 3. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
 - 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

- b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan gender.
- c. Terbangunnya kaukus perempuan, serta jejaring kemitraan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merepon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup organisasinya masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Implementasi kebijakan afirmatif terhadap perempuan belum sepenuhnya di tindak lanjuti.
- b. Budaya patriarki
- c. Masih rendahnya kualitas perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi

Tantangan / Hambatan

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga antara lain :

- d. Belum meratanya pemahaman tentang konsep gender strategi pengarusutamaan dan kesetaraan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama.
- e. Perbedaan gender yang terlihat dari kecenderungan peran masing masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Sedangkan peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan di dalam rumah berkaitan dengan kerumah tanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.
- f. Pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Pandangan tersebut telah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat.
- g. kultur budaya bahwa terdapat perbedaan kemampuan antara perempuan dan laki-laki dalam memimpin, bahkan perempuan selalu menilai bahwa kebudayaan suku/etnis mempengaruhi kepartisipasiannya dalam politik bahkan segi kultur budaya pun perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki baik itu ayah ataupun suami. Perempuan lebih ditekankan kepada budaya yang melekat, yang mengatakan bahwa perempuan adalah pelayan bagi laki-laki serta perempuan tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik.
- h. Segi keluarga adalah masih terikat dengan adanya faktor budaya yang menyatakan perempuan di dalam mengambil keputusan harus berdasarkan suami/ayah karena perempuan dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki serta tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik, sehingga kurangnya dukungan keluarga di dalam perempuan berpartisipasi.
- i. Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh

perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati. Inferioritas (rendah diri) akibat konstruk masyarakat juga menjadi hambatan perempuan dalam proses aktualisasi potensi dirinya. Kurang mampunya perempuan mengukur potensi diri menyebabkan perempuan seolah kehilangan jati dirinya. Sebagai akibatnya adalah pola pikir perempuan menjadi sangat akrab dengan kepasrahan, sengaja atau tidak akan dimanfaatkan oleh kekuatan superioritas laki-laki.

- j. Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan belum terpenuhi sepenuhnya
- k. Pembagian peran gender secara biologis antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas konstruk budaya patriarkis. Interpretasi agama yang disalahartikan merupakan hambatan karir perempuan dalam politik, sehingga perempuan berpartisipasi di wilayah politik tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya atau bahkan dirinya sendiri.
- l. Motivasi dari para perempuan untuk lebih terlibat aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera maupun dalam berpolitik masih rendah.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi perempuan perlu adanya dukungan dari semua pihak yang bersangkutan. Keterlibatan pemerintah, partai politik serta perempuan itu sendiri secara selaras akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah. Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan merupakan langkah yang dapat diambil oleh setiap elemen yang terlibat demi tercapainya caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Karena kebanyakan pendidikan politik yang diberikan saat ini terjadi ketika mendekati masa-masa pemilu. Hal ini yang kemudian menyebabkan kualitas para caleg terutama perempuan masih dibawah standard. Dengan diberikannya pendidikan politik secara berkelanjutan bagi perempuan diharapkan mampu memperbaiki kualitas dari perempuan itu sendiri, terutama di bidang politik. Dengan adanya peningkatan kualitas perempuan diharapkan masyarakat tidak lagi memandang rendah perempuan, sehingga kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi wakil rakyat tidak kalah dari laki-laki.

- b. Diperlukan pendekatan pemahaman kepada laki-laki terutama dalam keluarga dalam memahami peran dan posisi perempuan dalam membantu ekonomi keluarga.

Sasaran 3	Tingkat Capaian
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	233,41%

Tabel 3.24
Indikator Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	Jumlah perempuan korban kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan dikali 1000	0,0275	0,0189	129,21	0,0244	0,0105	233,41

Tolok ukur capaian sasaran Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO terdiri dari 1 indikator yaitu :

Indikator : Rasio kekerasan terhadap perempuan

- a. Jumlah Penduduk Perempuan di Kalimantan Tengah tahun 2018 = 1.243.559 orang dan pada tahun 2017 = 1.217.918 oarng
- b. Berdasarkan data yang tercatat pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah perempuan korban kekerasan pada tahun 2018 = 13 kasus, sedangkan pada tahun 2017 = 23 kasus
- c. Realisasi indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2108 = $(13/ 1.243.559)*1000 = 0,0105$
artinya pada 1000 orang penduduk perempuan di kalimantan tengah terdapat 0,0105 orang perempuan menjadi korban kekerasan
dapat juga menggunakan cakupan lebih luas per 100.000 orang penduduk perempuan maka pada 100.000 orang penduduk perempuan di Kalimantan Tengah terdapat 1,04 orang perempuan menjadi korban kekerasan.
- d. Realisasi indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2107= $(23/ 1.217.918)*1000 = 0,0189$

- artinya pada 1000 orang penduduk perempuan di kalimantan tengah terdapat **0,0189** orang perempuan menjadi korban kekerasan
 - dapat juga menggunakan cakupan lebih luas 100.000 orang penduduk perempuan maka pada 100.000 orang penduduk perempuan di Kalimantan Tengah terdapat **1,8** orang perempuan menjadi korban kekerasan
- e. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(0,0244 / 0,0105) \times 100 = 233,41\%$
- Dalam hal mempermudah akumulasi/rata-rata capaian keseluruhan kinerja DP3APKB perlu diperhatikan beberapa hal sbb :
 - Karena sasarannya – (negatif), untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerjanya, untuk menghitung capaian kinerja saaran rumusnya = **(target / capaian) * 100**
 - Pendekatannya apabila capaian menunjukkan persentase diatas 100%, maka pelaksanaan kinerja efektif (bergantung kepada jumlah kasus)
 - apabila capaian menunjukkan persentase dibawah 100%, maka pelaksanaan kinerja kurang efektif (bergantung kepada jumlah kasus)
 - tidak menutup kemungkinan persentasenya menurun apabila kasus meningkat, juga sebaliknya.
- f. Capaian kinerja sasaran = **233,41%**

Tabel 3.25

Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2016 – 2018

Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
	2016	2017	2018
KDRT	9	12	5
Pelecehan Seksual	0	0	0
Bunuh Diri	0	0	0
Eksplorasi Seksual	0	0	0
Aborsi	0	0	0
Pencurian	0	0	0
Perzinahan	3	0	3
Perdagangan Perempuan	0	1	0
Perkosaan	4	0	0
Penelantaran Dalam Rumah Tangga	5	3	1
Penganiayaan	0	2	2
Kekerasan psikis	0	2	1
Trauma	0	3	0
JUMLAH	21	23	13

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian dari indikator kinerja sasaran ini antara lain :

- a. Budaya yang berkembang di masyarakat yang membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa laki-laki harus kuat dan berani, menyebabkan pemikiran pada laki-laki sejak kecil bahwa dirinya haruslah yang menang dalam melakukan segala tindakan, hal ini membentuk *mindset* bahwa laki-laki adalah pihak yang superior dan perempuan adalah pihak inferior
- b. Laki-laki dan perempuan yang tidak diposisikan setara dalam masyarakat atau budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang paling nampak dalam kehidupan masyarakat adalah munculnya diskriminasi gender terutama tindak kekerasan terhadap perempuan
- c. Kondisi ekonomi yang masih labil mengakibatkan timbulnya berbagai perselisihan dalam rumah tangga sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau dari anak tidak terpenuhi
- d. Persepsi terhadap kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
 4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 5. Terbentuknya P2TP2A sebagai pusat pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.
 6. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan yang relevan. Program tersebut antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- 4) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Tantangan / Hambatan

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan menjadi suatu langkah besar dalam usaha pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk turut andil mengatasi kekerasan yang terjadi. Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan.
- b. Pola penanganan dalam hal penegakan hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya patriarki
- c. Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi kasus karena masih adanya persepsi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender
- e. *Capacity Building* tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak kepada Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota

- f. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dalam lingkup apartur penanganan kasus di Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/Kota
- g. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak.
- h. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- i. Memperkuat mekanisme pencatatan dan pelaporan

Sasaran 4	Tingkat Capaian
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100%

Tabel 3.26
Indikator Kinerja Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	Persen	Jumlah perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah perempuan korban kekerasan dikali 100	100	100	100	100	100	100

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

Indikator Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar merupakan rincian dari jumlah penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tuntas pada unit layanan P2TP2A dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di kali 100, pada tahun 2018 tercatat 13 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada P2TP2A

Provinsi Kalimantan Tengah sd Desember 2018 = 13 kasus dan pada tahun 2017 = 23 kasus

- b. Jumlah kasus yang sudah terlayani berdasarkan standar layanan pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember 2018 = 13 kasus dan pada tahun 2017 = 23 kasus
- c. Realisasi indikator Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar = $(13/23)*100 = 56\%$
- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(56/100)*100 = 56\%$
- e. Capaian kinerja sasaran = **100%**

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tidak optimalnya capaian pada sasaran Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, yaitu :

- a. Regulasi pada unit layanan lain yang terkait seperti Dinas Sosial dan Kepolisian yang memiliki prosedur dan tata layanan masing-masing.
- b. Perubahan struktur jabatan di unit layanan terkait.
- c. Kurang maksimalnya unit layanan pada Kabupaten/Kota
- d. Terbatasnya fasilitas guna penjangkauan kasus
- e. Masih kurangnya Kapasitas dan Kuantitas SDM pada unit layanan terbatas, dimana pada unit layanan sangat dibutuhkan tenaga profesional yang ditunjukkan dengan sertifikat keahlian, dan pada unit layanan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah tenaga profesional masih sangat jarang terutama yang memiliki sertifikat keahlian dalam hal mediasi dan konseling.
- b. Masih Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi data dasar guna formulasi kebijakan .
- c. Masih lemahnya sistem koordinasi kebijakan perlindungan anak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Masih kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- e. Munculnya suatu pola pemahaman dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan perlindungan anak yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen aksi perlindungan perempuan

- f. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkait perlindungan perempuan, yang dapat dituangkan kedalam suatu model inventarisasi masalah yang dapat disusun dalam bentuk konsep/naskah kajian permasalahan yang terjadi dan informasi-informasi lain yang mendukung guna memunculkan persepsi kebutuhan akan pentingnya aksi atas permasalahan yang terjadi, baik itu berupa suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang dinilai perlu dilaksanakan dalam menjawab isu yang ada.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan tumbuh kembang anak, antara lain adalah :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
 4. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah
- b. Terbentuknya P2TP2A sebagai pusat pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 3) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Tantangan / Hambatan

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan menjadi suatu langkah besar dalam usaha pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk turut andil mengatasi kekerasan yang terjadi. Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan.
- b. Pola penanganan dalam hal penegakan hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya patriarki
- c. Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi kasus karena masih adanya persepsi terhadap kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan sosial
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender
- e. *Capacity Building* tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak kepada Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota
- f. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak bagi internal Badan PP dan PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- g. Meningkatkan jumlah tenaga profesional yang bersertifikat dengan mengikutsertakan tenaga pendamping pada pelatihan dan uji kompetensi

- h. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak.
- i. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- j. Memperkuat mekanisme pencatatan dan pelaporan

Sasaran 5	Tingkat Capaian
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	53,93%

Tabel 3.27
Indikator Kinerja Sasaran 5

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	Persen	Jumlah kabupaten/kota Layak Anak dibagi Jumlah kabupaten/kota dikali 100	28,57	0	0	28,57	14,29	50
Rasio anak korban kekerasan	Rasio	Jumlah anak korban kekerasan dibagi Jumlah anak dikali 1000	0,0275	0,0478	57,52	0,0244	0,0422	57,86

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menjalankan perannya guna memastikan adanya peningkatan akses anak dan keluarganya terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan peningkatan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Demi terwujudnya kondisi yang idela yang menjadi tujuan bersama, dimana hak anak dapat terpenuhi, pandangan anak mendapatkan penghargaan, serta anak terlindungi. Perlu dikembangkan kebijakan yang dapat mewujudkan bebasnya anak dari berbagai diskriminasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan yang salah serta mampu memenuhi tumbuh kembang anak secara optimal, baik dibidang pendidikan, kesehatan, partisipasi dan lingkungan bagi tumbuh kembang anak yang optimal, untuk itu dikembangkan kebijakan dalam rangka percepatan Kabupaten/Kota layak anak. Selain itu kebijakan

lain yang terus diupayakan untuk diwujudkan adalah terkait dengan pemenuhan hak partisipasi anak dengan mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi pengembangan wadah-wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Partisipasi anak dalam kebijakan tersebut diartikan sebagai upaya melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak, secara langsung maupun tidak langsung, dilaksanakan atas dasar kesadaran, pemahaman dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan yang terjadi akibat dari keputusan tersebut. Terkait hal tersebut maka pada tahun 2018 ditetapkan sasaran strategis Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak, yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu sebagai berikut :

Indikator : Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama

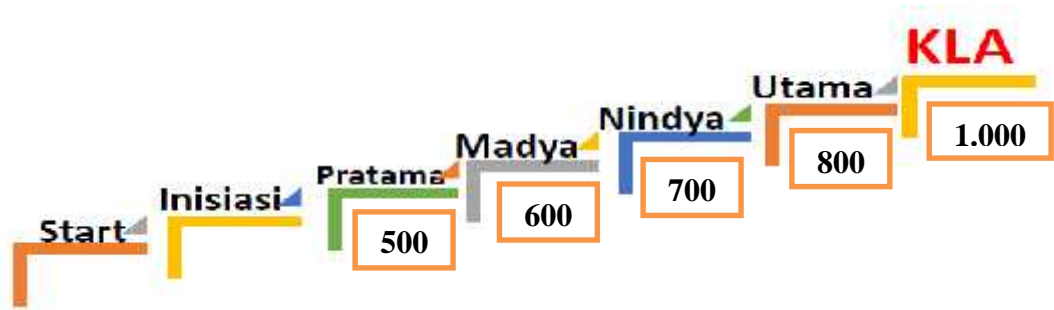
Kabupaten/Kota layak anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang diukur melalui 5(lima) klaster sebagai berikut :

- Klaster I : Hak sipil dan Kebebasan
- Klaster II : Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- Klaster III : Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- Klaster IV : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- Klaster V : Perlindungan khusus

Guna menentukan Kabupaten/Kota Layak Anak dilaksanakan evaluasi secara mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk menentukan pada tingkatan mana capaian Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang ditunjukkan dengan skor dengan kriteria sebagai berikut :

Gambar 3.25

Tingkatan KLA



Dimana skor pada masing-masing tingkatan ditentukan berdasarkan kriteria pencapaian terhadap :

- Kelembagaan 150 point
- Klaster I 135 point
- Klaster II 205 point
- Klaster III 185 point
- Klaster IV 110 point
- Klaster V 215 point
- Total 1000 point

Berdasarkan hasil penilaian mandiri pencapaian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.28
KLA berdasarkan penilaian mandiri 2018

Kabupaten / Kota	Skor	Kategori
Kotawaringin Barat	338,25	
Kotawaringin Timur	145,50	
Kapuas	358,60	
Barito selatan	174,00	
Barito utara	262,20	
Sukamara	18,50	
Lamandau	502,45	*Pratama
Seruyan	0,00	
Katingan	512,30	*Pratama
Pulang Pisau	337,65	
Gunung Mas	87,40	
Barito Timur	150,70	
Murung Raya	2,50	
Kota Palangka Raya	306,70	

Sistem Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berguna untuk menilai sampai sejauh mana Kabupaten/Kota se telah memenuhi Pemenuhan Hak Anak yang terbagi kedalam 5 Kluster Konvensi Hak Anak dengan pendekatan 24 Indikator. Dengan penilaian mandiri ini diharapkan dapat membantu dan mendorong serta memberikan pedoman kepada Kabupaten/Kota terkait apa saja yang perlu dilakukan ataupun dipersiapkan dalam mencapai pemenuhan hak anak.

Tabel 3.29
Capaian Kabupaten Katingan dan Lamandau

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Kabupaten	
			Katingan	Lamandau
	Kelembagaan			
1.	Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	40	40	37
2.	Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	85	58	70
3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	25	19	11
	Kluster I - Hak Sipil dan Kebebasan			
4.	Persentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	40	28	20
5.	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	40	23	16,5
6.	Terlembaganya Partisipasi Anak	55	42	43.5
	Kluster II - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif			
7.	Persentase Perkawinan Anak	45	22	16
8.	Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	35	8	12
9.	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	30	18	17
10.	Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif terstandarisasi	35	6.5	4
11.	Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak	60	24	14
	Kluster III - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan			
12.	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35	22	20
13.	Prevalensi Status Gizi Balita	40	26.5	19
14.	Persentase Cakupan Pemberian Malan pada Bayi dan Anak (PMBA) di Bawah 2 Tahun	35	10.5	9
15.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	25	9	6.5
16.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	25	18.5	13
17.	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok	25	6.5	10
	Kluster IV - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya			
18.	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	30	11	14.5
19.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	45	21	17.5

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Kabupaten	
			Katingan	Lamandau
20.	Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak	35	18	26
	Kluster V - Perlindungan Khusus			
21a.	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani	30	28.55	24.8
21b.	Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	25	5,5	7.25
22a.	Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HV/AIDS yang Terlayani	35	14	22.25
22b.	Anak Korban Bencana dan Konflik terlayani	25	8	8.5
23.	Anak penyandang disabilitas, kelompok monoritas dan tersolasi yang terlayani	30	0	17.9
24a.	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi	30	6	11
24b.	Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani	20	9.75	11.75
24c.	Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelebelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani	20	9	2.5
	TOTAL	1.000	512.30	502.45

Berdasarkan Penilaian di Tahun 2018, terdapat 2 (dua) Kabupaten yang memenuhi syarat untuk Tahap awal Penilaian Mandiri Evaluasi KLA yaitu, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Lamandau, sehingga kedua Kabupaten ini masuk ke penilaian Tahap II (Verifikasi Administrasi).

Pada tahun 2018 target indikator Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama ini realisasinya 50% dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Target pada tahun 2018 ditetapkan target **28,57%** atau terdapat **4** Kabupaten/Kota mendapatkan KLA dengan kategori pratama berdasarkan penilaian mandiri, dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Realisasi pada tahun 2018 sebesar **14,29%** atau terdapat **2** Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan KLA dengan kategori pratama berdasarkan penilaian mandiri
- c. Calaian indikator kinerja = **(14,29/28,57)*100=50%**
- d. Pada tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum ada Kabupaten/Kota yang mendapatkan KLA dengan kategori minimal pratama

Indikator : Rasio anak korban kekerasan

- a. Jumlah Penduduk usia anak di Kalimantan Tengah tahun 2018 = 948.596 orang, Jumlah Penduduk usia anak di Kalimantan Tengah tahun 2017 = 941.178 orang
- b. Jumlah kasus anak korban kekerasan tahun 2018 = 40 kasus, pada tahun 2017 = 45 kasus
- c. Target pada tahun 2018 = **0,0244**, target pada tahun 2017= 0,0275
- d. realisasi indikator Rasio anak korban kekerasan pada tahun 2018 = $(40 / 948.596) * 1000 = \mathbf{0,0422}$
- e. realisasi indikator Rasio anak korban kekerasan pada tahun 2017 = $(45 / 941.178) * 1000 = \mathbf{0,0478}$

artinya pada 1000 orang penduduk usia anak di kalimantan tengah pada tahun 2018 terdapat **0,0422** orang anak menjadi korban kekerasan, atau dengan menggunakan cakupan lebih luas 100.000 orang penduduk usia anak maka pada 100.000 orang penduduk usia anak di Kalimantan Tengah terdapat **4,2** orang anak menjadi korban kekerasan
- f. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(\mathbf{0,0244} / \mathbf{0,0422}) * 100 = \mathbf{57,86\%}$
 - Dalam hal mempermudah akumulasi/rata-rata capaian keseluruhan kinerja DP3APPKB nantinya perlu diperhatikan beberapa hal sbb:
 - Karena sasarannya – (negatif), untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerjanya, untuk menghitung capaian indikator rumusnya = **(target / capaian) * 100**
 - Pendekatannya apabila capaian menunjukkan persentase diatas 100%, maka pelaksanaan kinerja efektif (bergantung kepada jumlah kasus)
 - apabila capaian menunjukkan persentase dibawah 100%, maka pelaksanaan kinerja kurang efektif (bergantung kepada jumlah kasus)
 - tidak menutup kemungkinan persentasenya menurun apabila kasus meningkat, juga sebaliknya.
- g. Capaian kinerja sasaran = persentase rata-rata capaian Indikator 1 dan 2 = **53,93%**

Tabel 3.30
Data Kekerasan Terhadap Anak 2016- 2018 pada P2TP2A

Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
	2016	2017	2018
Persetubuhan Terhadap Anak	3	5	5
Perbuatan Cabul Terhadap Anak	8	8	11
Perkosaan Terhadap Anak	1	8	0
Penganiayaan Terhadap Anak	7	1	5
Perbuatan Asusila Anak	0	4	0
Perdagangan Anak (Trafficking) /pencurian	1	0	0
Pornografi dan Pornoaksi	1	1	0
Bawa Lari Anak	0	0	1
Adopsi Anak	0	1	0
Perebutan Hak Asuh Anak	4	1	4
Penelantaran Anak	0	11	9
Kekerasan Psikis	0	1	0
Trauma	0	3	3
ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	1	2	1
Kehamilan di Luar Nikah	0	1	0
Pernikahan Anak	0	0	1
JUMLAH	26	45	40

Sasaran 6	Tingkat Capaian
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	100%

Tabel 3.31
Indikator Kinerja Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah anak korban kekerasan dikali 100	100	100	100	100	100	100

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar

Indikator Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar merupakan rincian dari jumlah penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang tuntas pada unit layanan P2TP2A dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak kali 100, pada tahun 2018 tercatat 40 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 = 40 kasus dan pada tahun 2017 = 45 kasus
- b. Jumlah kasus yang sudah terlayani berdasarkan standar layanan pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember 2018 = 40 kasus dan pada tahun 2017 = 45 kasus
- c. Realisasi indikator Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar pada tahun 2018 = $(40/40)*100 = 100\%$ dan pada tahun 2017 = $(45/45)*100 = 100\%$
- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(100/100)*100 = 100\%$
- e. Capaian kinerja sasaran = **100%**

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian pada sasaran “Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak” dan “Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak” yaitu :

- a. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan Instansi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam beragam bentuk, seperti advokasi kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menggugah komitmen terhadap perlindungan hak anak
- b. Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar perumusan kebijakan .
- c. Masih lemahnya sistem koordinasi kebijakan perlindungan anak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Masih kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak
- e. Munculnya suatu pola pemahaman dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas

kebijakan perlindungan anak yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen aksi perlindungan anak.

- f. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkait perlindungan anak, yang dapat dituangkan kedalam suatu model inventarisasi masalah yang dapat disusun dalam bentuk konsep/naskah kajian permasalahan yang terjadi dan informasi-informasi lain yang mendukung guna memunculkan persepsi kebutuhan akan pentingnya aksi atas permasalahan yang terjadi, baik itu berupa suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang dinilai perlu dilaksanakan dalam menjawab isu yang ada.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan tumbuh kembang anak, antara lain adalah :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
 4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- b. Sudah terbentuknya gugus tugas Kabupaten/Kota layak anak di Kabupaten/Kota
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 3) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Tantangan / Hambatan

Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- d. Pembangunan yang peduli anak, termasuk perlindungan haknya, masih belum menjadi *mainstream* pemahaman para pemangku kepentingan
- e. Keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan advokasi dan fasilitasi tentang perlindungan hak anak
- f. Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan
- g. Masih kurangnya koordinasi kebijakan anak antara pihak pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota
- h. Belum optimalnya evaluasi kebijakan anak sebagai bahan penilaian, pengukuran, pengembangan dari kebijakan yang sudah ada

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan intervensi secara terus menerus oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk penguatan kelembagaan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan perlindungan anak
- b. Meningkatkan ketersediaan data pendukung sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan intensitas koordinasi, pengawasan dan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan atau isu yang berkembang di masyarakat terkait anak.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun kajian-kajian ilmiah terkait permasalahan anak melalui pelatihan-pelatihan dan diklat teknis penyusunan data anak

- d. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak
- e. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak kepada para pemangku kebijakan, anggota DPRD, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani perlindungan anak.
- g. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak

Sasaran 7	Tingkat Capaian
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	313,91%

Tabel 3.32
Indikator Kinerja Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Persen	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD dikali 100	6,67	0	0	8,89	27,91	313,91

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Indikator Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak merupakan rincian dari jumlah Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki sistem data gender dan anak atau dengan kata lain telah memiliki data terpilah dan telah dituangkan kedalam SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) yang dapat diakses pada SIGA Kalteng dengan alamat Url <http://dp3appkb.kalteng.go.id/siga/> pada tahun 2018 tercatat 12 Perangkat Daerah telah memiliki Data Gender dan anak dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jumlah perangkat daerah yang telah memiliki data gender dan anak yang sudah tercatat pada Sistem Informasi Gender dan Anak tahun 2018 = 12 Perangkat daerah dari 43 Perangkat Daerah pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Dinas Kesehatan
 - Disdukcapil Prov.kalteng
 - Disnakertrans prov.kalteng
 - Dinas Sosial Prov.kalteng
 - Dinas Kominfo Prov.kalteng
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.kalteng
 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov.Kalteng
 - Dinas Koperasi UMKM Prov.Kalteng
 - Dis Dagprin Prov.kalteng
 - BKD Prov.Kalteng
 - DP3APPKB
- b. Target pada tahun 2018 sebanyak 4 Perangkat Daerah telah memiliki data gender dan anak
- c. realisasi indikator Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak pada tahun 2018 = $(12 / 14) * 100 = 27,91\%$
- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(27,91 / 8,89) * 100 = 313,91\%$
- e. Capaian kinerja sasaran = **313,91%**

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
 1. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

- b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta implementasi data gender sebagai data sektoral pada lingkup kewenangannya asing-masing.
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merepon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup organisasinya masing-masing melalui tersedianya data terpilah gender.
- d. Terbangunnya Sistem Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses pada alamat url : www.dp3appkb.kalteng.go.id dimana didalamnya termuat aplikasi teknis Sistem Informasi Gender dan Anak yang memuat informasi data terpilah gender dan anak sektoral lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Belum adanya regulasi yang mendukung terintegrasinya perspektif gender didalam proses penyusunan Program dan Kegiatan di Kabupaten/Kota serta kebijakan data gender
- b. Masih rendahnya komitmen para penentu kebijakan di masing-masing Kabupaten/Kota
- c. Terbatasnya referensi untuk menggali dan mengidentifikasi isu gender yang ada yang berpengaruh pada ketersediaan data terpilah gender
- d. Keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin dimasing-masing sektor pembangunan
- e. Perubahan struktur organisasi yang berakibat adanya perubahan personel

kelembagaan daerah yang silih berganti dalam waktu singkat dan tentunya belum memahami permasalahan gender

- f. Sistem Informasi masih berkembang dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tantangan / Hambatan

Namun demikian dari keberhasilan capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai *gender machinery* di daerah belum optimal.
- b. Keterbatasan Akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan
- c. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- d. Terjadi perubahan struktur organisasi daerah, sehingga menyebabkan efektifitas sosialisasi, pelatihan, advokasi tidak optimal;
- e. Adanya pemahaman tentang PUG dan peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih bervariasi;
- f. Sebagian besar Perangkat Daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah.
- h. Terjadinya perkembangan dan dinamika perubahan sosial, politik, dan hukum serta pada pembangunan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam program dan strateginya.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui adanya advokasi khususnya kepada Kepala SKPD (unit eselon II), DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lingkup Pemerintah Daerah agar kebijakan

yang dibuat adalah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan (responsif gender) dan percepatan pelaksanaan PUG serta inovasi dalam pelaksanaan PUG yang tentunya disertai ketersediaan data terpilah gender sebagai data awal /data pembuka wawasan dalam analisis gender.

- b. Pendampingan secara intensif dalam rangka penguatan kelembagaan PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak pada di lingkup organisasi dan daerah mitra kerja
- c. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dalam rangka implementasi PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak
- d. Memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi tentang pelaksanaan Sistem Informasi Gender dan anak
- e. Penguatan Kelembagaan Data Gender
- f. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan memanfaatkan data gender.

Sasaran 8	Tingkat Capaian
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100%

Tabel 3.33
Indikator Kinerja Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hasil Penilaian SAKIP	Persen	Skor Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	B	B	100	B	B	100

Berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana. Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi

Perangkat Daerah dan pencapaian visi dan misi organisasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Sehingga disusunlah Sasaran Strategis “Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran”.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Hasil Penilaian SAKIP

- a. Hasil Penilaian laporan Kinerja tahun 2018 DP3APPKB mendapatkan angka = **61,55 = B**
- b. Hasil Penilaian laporan Kinerja tahun 2017 DP3APPKB mendapatkan angka = **61,90 = B**
- c. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = **100%**
- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2017 = 100%
- e. Capaian kinerja sasaran = **100%**

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Meskipun rata-rata pencapaian sasaran sudah baik, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya jumlah personil
- b. Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan kerja.
- c. Masih lemahnya sistem koordinasi internal organisasi
- d. Belum optimalnya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di organisasi.
- e. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan organisasi, antara lain adalah :
 - 1. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
 4. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Komitmen dalam pelaksanaan kinerja sudah terbentuk
 - c. Motivasi yang tinggi dalam membangun organisasi

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah

Tantangan / Hambatan

Beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian secara umum , antara lain :

- a. Berkembangnya sistem kebijakan pemerintahan menuntut profesionalisme para aparatur dalam berkinerja
- b. Pengelolaan kinerja organisasi yang menuntut perlunya pengawasan, kontrol, serta tindak lanjut yang berkesinambungan
- c. Antusias aparatur terhadap perubahan serta dinamika yang terjadi dalam organisasi, terkadang mempengaruhi kinerja

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan konsistensi dalam melaksanakan pengembangan kapasitas serta pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi yang dimulai dari unit terkecil dalam organisasi, yang diharapkan akan berdampak positif

- terhadap kapasitas dan kinerja aparatur
- b. Dilakukan evaluasi yang lebih objektif terhadap kinerja aparatur, serta pemberlakuan *punishment* dan *reward* terhadap aparatur.
 - c. Meningkatkan tatakelola organisasi

Selanjutnya berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana. Dalam mendukung kebijakan pemerintah dibidang keluarga berencana maka ditetapkan sasaran “Menurunnya angka kelahiran”, “Meningkatnya akseptor KB”, “Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)”, pada tahun 2018 Realisasi dari sasaran – sasaran tersebut sebagai berikut :

Sasaran 9	Tingkat Capaian
Menurunnya angka kelahiran	137,38 %

Tabel 3.34
Indikator Kinerja Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah kelahiran hidup laki2 dan perempuan tiap 1000 penduduk perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksi	2,33	2,80	83,21	2,31	2,50	92,40
Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	Jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga	1,1	0,58	189,88	1,2	0,66	182,37

Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya angka kelahiran terdiri dari 2(dua) indikator yaitu :

Indikator : Angka kelahiran total per WUS

Indikator Angka kelahiran total per WUS merupakan rincian dari Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksi, Dengan TFR sebagai acuan, suatu daerah dapat merencanakan program untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Capaian pada tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2018 Tota Fertility Rate Kalimantan Tengah berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) = **2,50**
- b. Pada tahun 2017 Tota Fertility Rate Kalimantan Tengah berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2017 = 2,78
- c. Pada tahun 2018 terjadi penurunan TFR sekitar 0,28, yang menunjukkan bahwa harapan untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat tercapai.

Indikator : Rata-rata jumlah anak per Keluarga

Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan rincian dari Jumlah penduduk anak usia 0-18 tahun di bagi dengan jumlah rumah tangga/keluarga, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk anak pada tahun 2018 berjumlah 444.615, pada tahun 2017 berjumlah 383.058
- b. Jumlah rumah tangga pada tahun 2018 berjumlah 675.690, pada tahun 2017 berjumlah 661.243
- c. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2018 = **$444.615/675.690=0,66$**
- d. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2017 = $383.058/661.243=0,58$
- e. Capaian pada tahun 2018 adalah 0,66 yang menunjukkan secara umum kondisi di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa dalam setiap rumah tangga rata-rata memiliki 0-1 orang anak, hal ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dalam mengendalikan laju angka kelahiran.
- f. persentase capaian pada tahun 2018 = **$(1,2/0,66)*100= 182,37\%$**
- g. Tingkat capaian sasaran pada tahun 2018 = **137,38**

Sasaran 10	Tingkat Capaian
Meningkatnya akseptor KB	97,64 %

Tabel 3.35
Indikator Kinerja Sasaran 10

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama	0,797	0,792	98,26	0,806	0,787	97,64

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya akseptor KB terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Rasio pemakaian kontrasepsi

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

- a. Jumlah peserta KB aktif sampai dengan bulan desember 2018 = 339.042
Jumlah peserta KB aktif sampai dengan bulan desember 2018 = 373.140
- b. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sampai dengan desember 2018 = 430.799
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sampai dengan desember 2017 = 471.099
- c. Realisasi indikator Rasio pemakaian kontrasepsi pada tahun 2018
= (339.042 / 430.799)*100 = **0,787%**
- d. Target pada tahun 2018 sebesar **0,806**
- e. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = (0,787/ 0,806)*100 = **97,64%**
- f. Capaian kinerja sasaran = **97,64%**

hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam berKB menurun **0,005** jika dibandingkan dengan tahun 2017 rasio akseptor KB **0,792**. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah peserta KB aktif dan Pasangan Usia Subur pada tahun 2018, meningkatnya akseptor KB menunjukkan kesadaran masyarakat terutama Pasangan usia subur (PUS) dalam menyadari pentingnya KB selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga mendapatkan tanggapan yang positif.

Jumlah pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB aktif per kabupaten/kota adalah dapat dilihat pada tabel 3.15 Data PUS dan Peserta KB Aktif 2016 – 2018.

Berikut ini data peserta KB aktif berdasarkan metode kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016-2018 :

Tabel 3.36
Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
1	2	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	10
1	Kotawaringin Barat	1113	775	129	1029	2753	17900	6735	30434
2	Kotawaringin Timur	1323	1308	209	1868	10524	32746	22261	70239
3	Kapuas	291	100	25	503	3068	9677	9276	22940
4	Barito Selatan	201	177	7	144	2751	5300	8242	16822
5	Barito Utara	254	151	25	282	1645	8537	8240	19134
6	Katingan	201	135	15	559	4042	13101	9562	27615
7	Seruyan	216	118	32	465	1932	7826	3929	14518
8	Sukamara	179	49	6	234	920	7253	2031	10672
9	Lamandau	289	100	97	112	1419	7647	3043	12707
10	Gunung Mas	91	182	6	242	2361	10974	2912	16768
11	Pulang Pisau	281	309	3	905	2266	8774	4679	17217
12	Murung Raya	270	256	10	377	1844	9352	7062	19171
13	Barito Timur	377	266	8	171	2014	6943	8457	18236
14	Kota Palangkaraya	1542	1054	149	1046	3577	19610	15591	42569
JUMLAH		6628	4980	721	7937	41116	165640	112020	339042

Sumber : BKKBN

Tabel 3.37

Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
1	2	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	10
1	Kotawaringin Barat	1033	727	126	921	2362	17721	9086	31976
2	Kotawaringin Timur	1230	1224	194	1818	9574	30677	21683	66400
3	Kapuas	1087	808	154	1534	10949	28768	23753	67053
4	Barito Selatan	180	127	7	135	2040	3831	6648	12968
5	Barito Utara	266	115	26	298	1745	8380	8141	18971
6	Katingan	284	140	19	648	4014	13504	10175	28784
7	Seruyan	202	102	27	544	1415	8331	3817	14438
8	Sukamara	132	25	1	229	635	6711	1882	9615
9	Lamandau	252	95	87	109	1305	7358	2743	11949
10	Gunung Mas	64	129	6	166	1979	12160	3091	17595
11	Pulang Pisau	1127	325	25	811	2313	7911	4092	16604
12	Murung Raya	212	186	10	361	1666	8589	6728	17752
13	Barito Timur	347	261	8	184	1725	8017	8439	18981
14	Kota Palangkaraya	1855	597	122	1188	3233	18384	14675	40054
JUMLAH		8271	4861	812	8946	44955	180342	124953	373140

Sumber : BKKBN

Tabel 3.38
Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	1050	762	134	884	2463	18261	9085	32639
2	Kotawaringin Timur	1107	1149	157	1680	9005	28332	20290	61720
3	Kapuas	1807	1512	137	4827	10912	24870	20391	64456
4	Barito Selatan	193	130	9	200	2735	8260	9327	20854
5	Barito Utara	245	102	26	289	1437	8508	8780	19387
6	Katingan	271	104	16	770	3711	13791	9675	28338
7	Seruyan	1079	85	16	693	2994	8780	4481	18128
8	Sukamara	86	9	0	186	305	4546	1295	6427
9	Lamandau	200	93	71	150	1162	6913	2550	11139
10	Gunung Mas	52	75	6	887	2987	12396	6809	23212
11	Pulang Pisau	445	284	27	1010	2032	10107	4468	18373
12	Murung Raya	184	98	10	327	1349	7613	5859	15440
13	Barito Timur	206	144	7	108	1033	4526	5437	11461
14	Kota Palangkaraya	1480	462	94	1313	2863	16931	13935	37078
JUMLAH		8405	5009	710	13324	44988	173834	122382	368652

Sumber : BKKBN

Sasaran 11	Tingkat Capaian
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	197,78%

Tabel 3.39
Indikator Kinerja Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	Rasio	Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak berKB (Unmet Need KB)	20,3	17,20	84,72	19,4	11,31	171,56

Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

- a. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan pada tahun 2018 = **23.864**, pada tahun 2017 = **54.393**
=((54393+26625)/471099)*100
- b. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin tambahan anak/tidak ingin punya anak pada tahun 2018 = **24.851**, pada tahun 2017 = **26.625**
- c. Jumlah Pasangan Usia Subur sampai dengan bulan Desember 2018 = **430.799**, pada tahun 2017 = **471.099**
- d. Realisasi indikator *unmet need KB* sampai dengan tahun 2018=
=((23864+24851)/430799)*100 = 11,31%
- e. Realisasi indikator *unmet need KB* pada tahun 2017=
=((54393+26625)/471099)*100= 17,20%
- f. Target pada tahun 2018 sebesar **19,4 %**, target pada tahun 2017 = **20,3%**
- g. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = (19,4/ 11,31)*100 = **197,76%**

Dalam hal mempermudah akumulasi/rata-rata capaian keseluruhan kinerja DP3APPKB perlu diperhatikan sebagai berikut :

- Karena sasarannya - (negatif), untuk mengukur tingkat keberhasilan

kinerjanya, untuk menghitung capaian(kolom9) rumusnya = ***(target / capaian)*100***

- Pendekatannya apabila capaian menunjukkan persentase diatas 100%, maka pelaksanaan kinerja efektif (bergantung kepada jumlah unmet need dan PUS)
- apabila capaian menunjukkan persentase dibawah 100%, maka pelaksanaan kinerja kurang efektif (bergantung kepada jumlah unmet need dan PUS)
- tidak menutup kemungkinan persentasenya menurun apabila Jumlah unmet need PUS meningkat, juga sebaliknya.

h. Capaian kinerja sasaran = **164,27%**

Berikut ini data peserta KB aktif berdasarkan metode kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016-2018 :

Tabel 3.40
Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB	PUS BUKAN PESERTA KB YANG			
				HAMIL	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK DITUNDA	TIDAK INGIN ANAK LAGI
1	2						
1	Kotawaringin Barat	42.782	12.348	2.787	3.633	2.787	3.141
2	Kotawaringin Timur	94.853	24.614	3.493	10.272	5.935	4.914
3	Kapuas	28.404	5.464	322	1.187	1.477	2.478
4	Barito Selatan	21.823	5.001	623	1.847	1.380	1.151
5	Barito Utara	23.817	4.683	636	1.205	1.381	1.461
6	Katingan	34.624	7.009	2.073	2.049	1.540	1.347
7	Seruyan	19.471	4.953	890	1.371	1.295	1.397
8	Sukamara	13.504	2.832	442	883	712	795
9	Lamandau	14.854	2.147	222	633	618	674
10	Gunung Mas	21.994	5.226	952	1.041	1.352	1.881
11	Pulang Pisau	20.600	3.383	343	666	1.130	1.244
12	Murung Raya	22.049	2.878	234	680	1.046	918
13	Barito Timur	23.112	4.876	384	1.552	1.056	1.884
14	Kota Palangkaraya	48.912	6.343	470	2.152	2.155	1.566
JUMLAH		430.799	91.757	13.871	29.171	23.864	24.851

Sumber : BKKBN

Tabel 3.41
Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB	PUS BUKAN PESERTA KB YANG			
				HAMIL	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK DITUNDA	TIDAK INGIN ANAK LAGI
1	2						
1	Kotawaringin Barat	44.388	12.412	2.451	3.533	2.841	3.587
2	Kotawaringin Timur	86.171	19.771	2.803	7.065	5.048	4.855
3	Kapuas	82.698	15.645	1.683	4.464	6.049	3.449
4	Barito Selatan	17.288	4.320	518	1.485	1.286	1.031
5	Barito Utara	23.980	5.009	694	1.369	1.448	1.498
6	Katingan	36.682	7.898	2.984	1.945	1.648	1.321
7	Seruyan	18.833	4.395	864	1.284	1.189	1.058
8	Sukamara	11.287	1.672	233	503	425	511
9	Lamandau	14.298	2.349	268	768	628	685
10	Gunung Mas	23.563	5.968	854	1.174	1.560	2.380
11	Pulang Pisau	21.054	4.450	718	634	1.314	1.784
12	Murung Raya	20.547	2.795	206	622	991	976
13	Barito Timur	24.210	5.229	501	1.587	1.270	1.871
14	Kota Palangkaraya	46.100	6.046	446	1.910	2.071	1.619
JUMLAH		471.099	97.959	15.223	28.343	27.768	26.625

Sumber : BKKBN

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Meskipun rata-rata pencapaian sasaran sudah baik, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan Instansi Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota terkait bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar pengajuan peformulaan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi.
- d. Masih kurangnya komitmen para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga muncul anggapan bahwa Sektor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera hanya merupakan sektor pendukung dalam Pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Munculnya suatu pola pemahaman dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator, yaitu :

- Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dan perundang-undangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007
- Kemajuan teknologi informasi dan kemudahan informasi tentang KB serta Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.

- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Tantangan / Hambatan

Namun demikian sama dengan sasaran sebelumnya dari keberhasilan capaian tersebut di atas, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan advokasi dan fasilitasi tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- c. Masih kurangnya koordinasi kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara pihak pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota
- d. Belum optimalnya evaluasi kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai bahan penilaian, pengukuran, pengembangan dari kebijakan yang sudah ada

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan intervensi secara terus menerus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal penguatan kelembagaan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Meningkatkan ketersediaan data pendukung sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan intensitas koordinasi, pengawasan dan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan atau isu yang berkembang di masyarakat terkait Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun kajian-kajian ilmiah terkait permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui pelatihan-pelatihan dan diklat / bimbingan teknis
- d. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang efektif dan efisien

- e. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada para pemangku kebijakan, anggota DPRD, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Pemantapan dan penguatan kelembagaan/forum daerah yang menangani bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- g. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2018 adalah sebesar 15.141.834.660 (*Lima belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah*) ,dengan rincian :

Tabel 3.42
Kondisi BTL dan BL 2017 - 2018

JENIS BELANJA	2017			2018		
	JUMLAH	REALISASI	%	JUMLAH	REALISASI	%
BTL	6.931.201.216	6.129.066.675	88,43	7.313.078.668	6.458.149.599	88,31
BL	5.059.510.000	4.927.634.188	97,39	7.828.755.992	4.927.634.188	89,37
Jumlah	11.990.771.216	11.056.700.863	92,21	15.141.834.660	13.454.445.455	88,86

2. Realisasi anggaran Belanja Langsung perprogram kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimanan Tengah tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43
Realisasi Belanja Langsung 2017 - 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2017			REALISASI 2018		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.556.860.000	1.486.361.902	95,47	1.480.155.192	1.443.489.934	97,52
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	5.995.000	99,92	7.500.000	7.500.000	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.400.000	42.979.497	62,84	35.396.192	25.398.925	71,76
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.000.000	55.120.156	91,87	68.000.000	62.597.679	92,06
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	591.328.000	581.896.000	98,40	643.325.000	636.500.000	98,94
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	150.000.000	137.239.000	91,49	150.000.000	137.492.000	91,66

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2017			REALISASI 2018		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000	14.925.000	99,50	20.000.000	19.950.000	99,75
7	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000	59.999.400	100,00	50.000.000	49.999.600	100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	39.999.950	100,00	40.000.000	39.830.000	99,57
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	46.000.000	45.721.000	99,39
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	16.380.000	81,90	13.320.000	13.320.000	100,00
12	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000	34.990.000	99,97	30.000.000	29.975.000	99,92
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	310.000.000	305.834.499	98,66	196.000.000	195.063.495	99,52
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	181.132.000	181.003.400	99,93	170.614.000	170.142.235	99,72
15	Rujukan Berobat PNS	10.000.000	0	0,00	0	0	0
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.000.000	24.952.500	99,81	35.000.000	35.000.000	100,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	24.952.500	99,81	10.000.000	10.000.000	100,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	0	0	0	25.000.000	25.000.000	100,00
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	0	0,00	0	0	0
1	Rapat koordinasi perencanaan	0	0	0,00	0	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2017			REALISASI 2018		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	48.000.000	47.892.000	99,78
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	48.000.000	47.892.000	99,78
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	48.000.000	47.892.000	99,78
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	48.000.000	47.892.000	99,78
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	15.000.000	12.825.000	85,50
1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	15.000.000	12.825.000	85,50
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80.000.000	79.987.500	99,98	54.413.000	53.875.000	99,01
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja S KPD	15.000.000	15.000.000	100,00	11.302.000	11.149.600	98,65
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.000.000	15.000.000	100,00	13.111.000	12.847.200	97,99
3	Penyusunan rka-SKPD	25.000.000	24.995.000	99,98	15.000.000	14.878.200	99,19
4	Penyusunan renja SKPD	25.000.000	24.992.500	99,97	15.000.000	15.000.000	100,00
V	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1.505.000.000	1.481.037.838	98,41	1.920.188.800	1.882.646.647	98,04
1	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	200.000.000	192.248.500	96,12	200.000.000	197.904.579	98,95
2	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab/Kota	140.000.000	139.401.760	99,57	65.000.000	63.175.000	97,19
3	Rakor Pokja PUG Kab/Kota se-Kalteng	0	0	0,00	0	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2017			REALISASI 2018		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatap PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	50.000.000	48.514.405	97,03	593.788.800	570.820.400	96,13
5	Sosialisasi Pembentukan Pokjatap dan Satgas PkdRT se-Kalteng	0	0	0,00	0	0	0
4	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi	0	0	0	75.000.000	74.398.600	99,20
6	Sosialisasi/Advokasi Pengembangan PHA di Kab/Kota seKalimantan Tengah	140.000.000	138.839.700	99,17	0	0	0
5	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	0	0	0	200.000.000	197.664.050	98,83
6	Rakornas Forum Anak Nasional	0	0	0	171.000.000	168.919.607	98,78
7	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	0	0	0	66.804.000	64.996.400	97,29
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	200.000.000	199.899.000	99,95	104.500.000	104.499.800	100,00
9	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA	0	0	0	271.000.000	270.913.061	99,97
10	Monev PUG di Daerah	0	0	0	91.246.000	89.333.000	97,90
11	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didiera	0	0	0	81.850.000	80.022.150	97,77
7	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	275.000.000	274.014.850	99,64	0	0	0
8	Rakornas Forum Anak Nasional	150.000.000	139.088.258	92,73	0	0	0
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	200.000.000	199.899.000	99,95	0	0	0
10	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	0	0	0,00	0	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2017			REALISASI 2018		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Rapat Koordinasi Forum Data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab/Kota	0	0	0,00	0	0	0
12	Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	350.000.000	349.031.365	99,72	0	0	0
VI	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	75.000.000	74.900.000	99,87	87.453.000	84.368.650	96,47
1	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	50.000.000	50.000.000	100,00	55.000.000	52.115.700	94,76
2	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	25.000.000	24.900.000	99,60	32.453.000	32.252.950	99,38
3	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	0	0	0,00	0	0	0
4	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	0	0	0,00	0	0	0
5	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	0	0	0,00	0	0	0
VII	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.000.000.000	977.822.334	97,78	746.000.000	727.171.330	97,48
1	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	400.000.000	391.605.697	97,90	250.000.000	246.643.839	98,66
2	Sosialisasi Anti Kekerasan	50.000.000	49.997.500	100,00	0	0	0
3	Penyusunan Buku Penduan Pencegahan KdRT	0	0	0,00	0	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2017			REALISASI 2018		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	500.000.000	486.455.737	97,29	288.000.000	278.300.537	96,63
5	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se Kab/Kota	0	0	0,00	80.000.000	78.127.004	97,66
6	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan, dll)	50.000.000	49.763.400	99,53	40.000.000	40.000.000	100,00
7	Deteksi dini ca cervix bagi perempuan	0	0	0,00	0	0	0
8	Sosialisasi advokasi layanan P2TP2A	0	0	0	48.000.000	47.099.950	98,12
9	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0	0	0	40.000.000	37.000.000	92,50
VII I	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	300.000.000	292.404.414	97,47	2.403.071.000	1.719.844.327	71,57
1	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	0	0	0,00	100.000.000	92.615.000	92,61
2	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	0	0	0,00	0	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2017			REALISASI 2018		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	0	0	0,00	0	0	0
4	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional)	50.000.000	47.402.614	94,81	0	0	0
5	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan Dalam Menunjang PM2L	150.000.000	149.081.200	99,39	0	0	0
6	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	100.000.000	95.920.600	95,92	2.220.571.000	1.546.947.527	69,66
7	Capacity Building Bagi Perempuan	0	0	0	37.500.000	36.675.000	97,80
8	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	0	0	0	45.000.000	43.606.800	96,90
XI	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	0	0	0	160.000.000	156.427.600	97,77
1	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	0	0	0	80.000.000	79.941.800	99,93
2	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	0	0	0	80.000.000	76.485.800	95,61
IX	Program Penyusunan Profil Lembaga	295.000.000	288.751.550	97,88	244.643.000	206.578.678	84,44

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2017			REALISASI 2018		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengembangan S istem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	0	0	0	32.351.000	32.351.000	100,0 0
2	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	220.000.000	214.637.050	97,56	145.959.000	111.287.778	76,25
3	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	75.000.000	74.114.500	98,82	66.333.000	62.939.900	94,88
X	Program Keluarga Berencana	200.000.000	198.766.150	99,38	294.182.000	287.219.890	97,63
1	Pelayanan KIE	125.000.000	124.631.150	99,70	65.000.000	63.892.400	98,30
2	Promosi Keikutsertaan Ber KB Pada Pasangan Usia S ubur (PUS)	75.000.000	74.135.000	98,85	0	0	0
3	Konsultasi/Koordi nasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	35.000.000	34.996.400	99,99	62.000.000	61.938.900	99,90
2	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	0	0	0	29.670.000	28.669.850	96,63
4	S inkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	0	0	0	41.200.000	36.881.000	89,52
5	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga S ejahtera	0	0	0	50.000.000	49.934.140	99,87

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2017			REALISASI 2018		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	0	0	0	46.312.000	45.903.600	99,12
XI V	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	0	0	0	268.000.000	267.859.850	99,95
1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	0	0	0	268.000.000	267.859.850	99,95
XV	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	0	0	0	50.000.000	48.999.950	98,00
1	Peningkatan Kualitas S DM	0	0	0	50.000.000	48.999.950	98,00
XI	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah	22.650.000	22.650.000	100,00	22.650.000	22.097.000	97,56
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	22.650.000	22.650.000	100,00	22.650.000	22.097.000	97,56
JUMLAH		5.059.510.000	4.927.634.188	97,39	7.828.755.992	4.927.634.188	89,37

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi belanja langsung tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018. Selanjutnya perkembangan dukungan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5(lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.44
BTL 2014 - 2018

Uraian	Belanja Tidak Langsung (BTL)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pagu Anggaran	3.944.767.552	5.028.078.438	5.977.097.105,10	6.931.201.216	7.313.078.668
Realisasi	3.897.054.866	4.875.019.783	5.853.917.664	6.129.066.675	6.458.149.599
%	98,79	96,96	97,94	88,43	88,31

Tabel 3.45
BL 2014 - 2018

Uraian	Belanja Langsung (BL)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pagu Anggaran	8.257.303.580	7.886.000.000	6.387.500.000	5.059.510.000	7.828.755.992
Realisasi	7.925.761.152	7.657.996.023	6.226.672.355	4.927.634.188	4.927.634.188
%	95,98	97,11	97,48	97,39	89,37

Pada tahun anggaran 2018 Terdapat 1 (satu) kegiatan dengan tingkat realisasi dibawah 80 persen sebagai berikut :

Tabel 3.46
Relisasi Kegiatan dibawah 80%

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Relisasi	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.396.192	25.398.925	71,76
2	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	2.220.571.000	1.546.947.527	69,66
3	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	145.959.000	111.287.778	76,25

- Kegiatan “Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik “ realisasi keuangan mencapai 71,76 % dengan realisasi fisik 100 %. kurang maksimalnya penyerapan belanja pada kegiatan dikarenakan terdapat rekening belanja yang tidak habis terpakai
 - belanja listrik Rp. 12.596.192 terrealisasi Rp. 8.412.278 atau 66,78%
 - belanja telepon Rp. 20.100.000 terrealisasi Rp. 16.989.647 atau 84,51%
 - belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

Rp. 2.700.000 terrealisasi Rp. 0 atau 0%

namun demikian tidak menghambat pencapaian output dari kegiatan karena secara fisik terrealisasi 100%.

- Kegiatan “Promosi Peningkatan Peran serta Perempuan Dalam Pembangunan” realisasi keuangan mencapai 69,66 % dengan realisasi fisik 100 %. kurang maksimalnya penyerapan belanja pada kegiatan dikarenakan terdapat rekening belanja yang tidak habis terpakai
 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp. 50.000.000 terrealisasi Rp. 3.055.000 atau 6,11%
 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp. 337.500.000 terrealisasi Rp. 178.850.000 atau 52,99%
 - Belanja Sewa Sound System Rp. 50.000.000 terrealisasi Rp. 10.500.000 atau 21%
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 377.100.000 terrealisasi Rp. 201.342.000 atau 53,39%
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 392.500.000 terrealisasi Rp. 241.632.227 atau 61,56%

Pada kegiatan ini yang menjadi salah satu output adalah terlaksananya rangkaian PHI ke 90 Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya pada tanggal 11-15 Desember 2018 dan puncak acara dilaksanan di Bukit Tinggi pada tanggal 22 Desember 2018. proses administrasi keuangan yang sudah terjadwal pada akhir tahun mengakibatkan proses realisasi anggaran menjadi kurang maksimal namun secara keseluruhan kebutuhan belanja untuk pelaksanaan kegiatan dapat terakomodir dengan baik dengan realisasi fisik 100%.

- Kegiatan “Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak” realisasi keuangan mencapai 76,25 % dengan realisasi fisik 100%. kurang maksimalnya penyerapan belanja pada kegiatan dikarenakan terdapat rekening belanja yang tidak habis terpakai
 - Belanja Cetak Rp. 8.070.000 terrealisasi Rp. 570.000 atau 7,06%
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 49.443.300 terrealisasi Rp.27.360.000 atau 55,34%

namun demikian tidak menghambat pencapaian output dari kegiatan karena secara fisik terrealisasi 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan peformulaan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2016 - 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021, maupun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan

perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha.

B. Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan cukup berhasil dalam pelaksanaan tugasnya. namun demikian masih banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Sarana dan prasarana penunjang kerja yang masih perlu ditingkatkan.
2. Belum tersedianya data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program dan Kegiatan.
3. Belum terbentuknya kerjasama yang kuat secara sektoral maupun lintas sektoral dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan serta pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta Lembaga-lembaga terkait.
4. Dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan dan dasar pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat kekurangan sehingga masih sulit untuk tahap pelaksanaan program kegiatan dan evaluasinya.
5. Belum cukup baiknya strategi kebijakan Perencanaan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan masih belum efektif dan efisien guna pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kewenangan yang belum kuat antara fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyangkut Program KB.

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif (hanya Program/Kegiatan terkait kinerja SKPD yang menjadi prioritas) sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
3. Mengingat kurangnya data sektoral terkait urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah baik data primer maupun data sekunder maka perlu dilakukan inventarisasi dan survei data terkait kinerja SKPD terutama dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah pengukuran hasil kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya
4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan dan penganggaran terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai peformula kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di semua SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap SKPD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengubah *mindset* individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak.

Oleh karena itu, indikator *outcome*, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih banyak bersifat kualitatif dan tidak mudah diukur terutama dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan berbagai SKPD dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, cenderung bernuansa kualitatif, dan acapkali merupakan *outputs* dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan berarti kinerja SKPD ini tidak dapat diukur.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M.H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 23 Maret 2018

PIHAK KEDUA :
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

PIHAK PERTAMA :
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,14 persen
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	28,89 persen
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,31 persen
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0244
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100 persen
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	28,57 persen
		Rasio anak korban kekerasan	0,0244
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100 persen
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	8,89 persen
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B
9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,31
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,2
10	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,806
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	19,4 persen

Program		Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.482.759.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 35.000.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 48.000.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Rp. 22.650.000
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 54.413.000
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 10.000.000,-
7.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp. 1.374.400.000
8.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 87.453.000
9.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 746.000.000
10.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 282.500.000
11.	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Rp. 160.000.000
12.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Rp. 268.000.000
13.	Program Penyusunan Profil Lembaga	Rp. 244.643.000
14.	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Rp. 50.000.000
15.	Program Keluarga Berencana	Rp. 294.182.000

PIHAK KEDUA :
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

PIHAK PERTAMA :
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

H. SUGIANTO SABRAN

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berdasarkan PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**
NIP : 19630527 199102 1 001
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka dirasa perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 23 Maret 2018

Mengetahui,

GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH, **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

H. SUGIANTO SABRAN **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	(Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dibagi Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng) dikali 100	DP3A-PPKB, BAPPEDALitbang, Bakeuda
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	(Jumlah Perempuan di lembaga legislative (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD)) dikali 100	DP3A-PPKB, BPS, Setwan
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	(Jumlah Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga dibagi Total Pendapatan) dikali 100	DP3A-PPKB, BPS
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan) dikali 1000	DP3A-PPKB (P2TP2A)
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang dilayani sesuai Standar dibagi Jumlah Perempuan Korban Kekerasan) dikali 100	DP3A-PPKB (P2TP2A)
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	(Jumlah Kab./Kota Layak Anak dibagi Jumlah Kab./Kota dibagi Jumlah Kab./Kota) dikali 100	DP3A-PPKB
		Rasio anak korban kekerasan	(Jumlah Anak Korban Kekerasan dibagi Jumlah Anak) dikali 1000	DP3A-PPKB (P2TP2A)
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	(Jumlah Anak Korban Kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi Jumlah Anak Korban Kekerasan) dikali 100	DP3A-PPKB (P2TP2A)

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD) dikali 100	DP3A-PPKB
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	-	Inspektorat, Biro Ortal
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksi	BPS, BKKBN
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga	BPS, BKKBN
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur (PUS) pada tahun yang sama	BPS, BKKBN
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).	(Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak ber-KB (Unmet Need KB) dibagi Total Jumlah PUS) dikali 100	BPS, BKKBN

Palangka Raya, 23 Maret 2018

Mengetahui,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

H. SUGIANTO SABRAN

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SOPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,14 persen
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	28,89 persen
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,31 persen
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0244
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100 persen
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	28,57 persen
	Rasio anak korban kekerasan	0,0244
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100 persen
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	8,89 persen
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,31
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,2
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,806
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).	19,4 persen

Palangka Raya, Juni 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


LIES FAHIMAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631207 199102 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SOPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tahun Anggaran : 2019

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,57 persen
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	28,89 persen
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,36 persen
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0213
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100 persen
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	35,71 persen
	Rasio anak korban kekerasan	0,0213
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100 persen
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	11,11 persen
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan	Hasil Penilaian SAKIP	B+

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
pelaporan program dan anggaran		

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,28
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,815
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).	18,51 persen

Palangka Raya, 23 Maret 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

RENCANA AKSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Jabatan	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Sebagai	:	Pihak Pertama
Nama	:	H. SUGIANTO SABRAN
Jabatan	:	Gubernur Kalimantan Tengah
Sebagai	:	Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan membuat laporan target rencana kinerja yang direalisasikan pada laporan Triwulan, yang termuat dalam Rencana Aksi terlampir.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi, yang diperukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, 23 Maret 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

LAMPIRAN : RENCANA AKSI
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

A. Target Realisasi Kinerja									
No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Satuan	Waktu Pelaksanaan				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,14	persen	1,71	1,71	2,14	2,14	
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	28,89	persen	28,89	28,89	28,89	28,89	
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,31	persen	33,31	33,31	33,31	33,31	
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0244	rasio	0,0275	0,0275	0,0244	0,0244	
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100	persen	25	25	25	25	
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	28,57	persen	28,57	28,57	28,57	28,57	
		Rasio anak korban kekerasan	0,0244	rasio	0,0275	0,0275	0,0244	0,0244	
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100	persen	25	25	25	25	
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	8,89	persen	8,89	8,89	8,89	8,89	

8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B	skor	B	B	B	B	
9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,31	Total Fertility Rate (TFR)	2,31	2,31	2,31	2,31	
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,2	anak	1,2	1,2	1,2	1,2	
10	Meningkatnya akseptor KB peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,806	rasio	0,806	0,806	0,806	0,806	
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	19,4	persen	19,5	19,5	19,4	19,4	

B. Target Realisasi Keuangan								
No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.482.759.000	430.254.000	343.836.000	363.215.100	345.453.900	
1		Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	107.600.000	26.901.000	26.901.000	26.901.000	26.897.000	
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50.000.000	23.749.000	8.749.000	8.749.000	8.753.000	
4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	658.100.000	164.418.000	164.418.000	164.418.000	164.846.000	
5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	150.000.000	37.080.000	37.280.000	37.500.000	38.140.000	
6		Penyediaan jasa perbaikan	20.000.000	2.500.000	7.000.000	3.500.000	7.000.000	

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		peralatan kerja						
7		Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	12.501.000	12.501.000	12.501.000	12.497.000	
8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	9.999.000	9.999.000	9.999.000	10.003.000	
9		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	3.000.000	2.000.000	3.500.000	1.500.000	
10		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	46.000.000	46.000.000	0	0	0	
11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.200.000	6.801.000	6.801.000	6.801.000	6.797.000	
12		Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	6.005.000	9.423.000	4.999.000	9.573.000	
13		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	145.464.000	50.000.000	25.464.000	45.000.000	25.000.000	
14		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	142.395.000	39.300.000	31.300.000	39.347.100	32.447.900	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		35.000.000	0	35.000.000	0	0	
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	0	10.000.000	0	0	
		Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat paker	25.000.000	0	25.000.000	0	0	
III	Program peningkatan disiplin aparatur		48.000.000	48.000.000	0	0	0	
1		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	48.000.000	48.000.000	0	0	0	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10.000.000	3.000.000	3.750.000	0	3.250.000	

N o.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ke t (9)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1		Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000	3.000.000	3.750.000	0	3.250.000	
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		54.413.000	0	15.000.000	15.000.000	24.413.000	
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.302.000	11.302.000	0	0	11.302.000	
2		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.111.000	0	0	0	13.111.000	
3		Penyusunan RKA	15.000.000	0	0	15.000.000	0	
4		Penyusunan Renja	15.000.000	0	15.000.000	0	0	
VI	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		22.650.000	11.700.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	
1		Pengelolaan inventaris barang daerah	22.650.000	2.650.000	2.650.000	5.645.000	11.705.000	
VII	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		1.374.400.000	433.397.000	670.194.500	227.600.000	43.208.500	
1		Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	200.000.000	97.397.000	102.603.000	0	0	
2		Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota	65.000.000	65.000.000	0	0	0	
3		Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	48.000.000	0	48.000.000	0	0	
4		Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi	75.000.000	0	75.000.000	0	0	
5		Sosialisasi	100.000.00	34.157.80	65.842.200	0	0	

N o.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ke t (9)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pembentukan Pokjatap dan Satgas PkdRT se-Kalteng	0	0				
6		Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	100.000.000	0	0	100.000.000	0	
7		Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi	75.000.000	75.000.000	0	0	0	
8		Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	200.000.000	0	0	200.000.000	0	
9		Rakornas Forum Anak Nasional	171.000.000	0	171.000.000	0	0	
10		Sosialisasi/Advokasi Pemenuhan Hak Anak	66.804.000	0	66.804.000	0	0	
11		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	104.500.000	0	87.941.500	0	16.558.500	
12		Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah tentang PHA	271.000.000	271.000.000	0	0	0	
13		Monev PUG di Daerah	91.246.000	0	91.246.000	0	0	
14		Monev Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah	81.850.000	0	27.600.000	27.600.000	26.650.000	
VII I	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		87.453.000	0	64.983.000	11.235.000	11.235.000	
1		Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	55.000.000	32.530.000	11.235.000	11.235.000	0	
2		Pemantapan Jejaring Kelembagaan	32.453.000	0	32.453.000	0	0	
IX	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		746.000.000	154.773.800	371.363.700	131.089.700	88.772.800	
1		Peningkatan Peran dan	250.000.000	31.162.000	106.280.700	64.282.000	48.275.300	

N o.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ke t (9)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng						
2		Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	288.000.000	82.905.500	97.789.300	66.807.700	40.497.500	
3		Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se-Kab./Kota	80.000.000	0	80.000.000	0	0	
4		Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)	40.000.000	14.875.000	25.125.000	0	0	
5		Sosialisasi Advokasi Layanan P2TP2A	48.000.000	25.831.300	22.168.700	0	0	
6		Promosi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	40.000.000	0	40.000.000	0	0	
X	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		282.500.000	0	202.335.800	0	80.164.200	
1		Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	100.000.000	0	100.000.000	0	0	
2		Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	100.000.000	0	19.835.800	0	80.164.200	
3		Capacity Buliding bagi Perempuan	37.500.000	0	37.500.000	0	0	
4		Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	45.000.000	0	45.000.000	0	0	
XI	Program Peningkatan Kesejahteraan dan		160.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	

N o.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ke t (9)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Perlindungan Anak							
1		Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	80.000.000	0	0	0	80.000.000	
2		Pembentukan Pokja Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	80.000.000	0	0	80.000.000	0	
XII	Program Penyusunan Profil Lembaga		244.643.000	49.600.900	20.543.100	151.389.000	23.110.000	
1		Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	32.351.000	32.351.000	0	0	0	
2		Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	145.959.000	0	2.850.000	131.389.000	11.720.000	
3		Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	66.333.000	17.249.900	17.693.100	20.000.000	11.390.000	
XII I	Program Keluarga Berencana		294.182.000	44.275.400	97.706.600	118.518.900	33.681.100	
1		Pelayanan KIE	65.000.000	0	4.000.000	61.000.000	0	
2		Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran pada Masyarakat Kab.Kota se-Kaliamntan Tengah	29.670.000	8.185.000	21.485.000	0	0	
3		Konsultasi/Koordnasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	62.000.000	36.090.400	25.909.600	0	0	
4		Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	41.200.000	0	0	41.200.000	0	
5		Monev Pelaksanaan	50.000.000	0	0	16.318.900	33.681.100	

N o.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ke t (9)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
6		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakata n dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber- KB	46.312.000	0	46.312.000	0	0	
XI V	Program Peningkatan Penanggulan gan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		268.000.00 0	0	268.000.00 0	0	0	
1	Penyuluhan Penanggulang an Narkoba dan PMS di Sekolah		268.000.00 0	0	268.000.00 0	0	0	
XV	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas		50.000.000	0	50.000.000	0	0	
1	Peningkatan Kualitas SDM		50.000.000	0	50.000.000	0	0	

Palangka Raya, 23 Maret 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Sertifikat ISO 9001:2015

Ruang lingkup sertifikasi yakni Pelayanan pengaduan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan, Pelayanan rujukan kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan, Pelayanan Bantuan Hukum dan Advokasi, Pelayanan rujukan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan, Pelayanan Rujukan Pemulangan.

Anugerah Parahita Eka Praya (APE) kategori Madya- Tahun 2018

Anugerah Parahita Ekapraya 2018 adalah sebuah penghargaan sebagai apresiasi bagi kementerian/lembaga, Pemprov dan kabupaten/kota yang telah antusias mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara online mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.

Interface Website DP3APPKB : www.dp3appkb.kalteng.go.id



Interface SIGA Kalteng : www.dp3appkb.kalteng.go.id/siga/

